

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
NO 7 TAHUN 2016 BAB XVI BAGIAN KEDUA TENTANG
BUDAYA MEMBACA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM LITERASI
DI KECAMATAN TELUK MEMNGKUDU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

OLEH

**MUHAMMAD ARIEF ADILLAH
181801025**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)

HALAMAN PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **MUHAMMAD ARIEF ADILLAH**, NPM : 181801025 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang – Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku.
2. Bahwa tesis ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Tesis saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah pasca sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2020

Yang menyatakan,

MUHAMMAD ARIEF ADILLAH

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2016 BAB XVI BAGIAN KEDUA TENTANG BUDAYA MEMBACA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM LITERASI DI KECAMATAN TELUK MEMNGKUDU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

OLEH :

Name : MUHAMMAD ARIEF ADILLAH
NPM : 181808025
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing 1 : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Pembimbing 2 : Dr. Nina salmaniah Siregar, M.Si

Budaya Membaca merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusi (SDM) yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan desa Dengan demikian program literasi adalah suatu usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cooperative dan potensial. Berdasarkan kebijakan peraturan daerah tentang budaya membaca di lingkungan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas, sarana pendidikan dan kemampuan masyarakat di kecaaaamatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi budaya membaca di ingkungan masyrakat dalam pelaksanaan program literasi.. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder

Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspek-aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat Dalam pelaksanaan program Literasi di Kecamatan Teluk Mengkudu. masih kurang efektif, dan kurang maksimal. karena masih kurangnya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Literasi begitu pula debgan belum adanya pedoman dan acuan yang baku dan disepakati bersama, dan juga partisipasi masyarakat yang sangat minim, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung program Literasi di Kecamatan Teluk Mengkudu.

Kata Kunci: *Budaya Membaca, Program Literasi.*

*IMPLEMENTATION OF REGIONAL POLICY REGULATION NO. 7 OF 2016
CHAPTER XVI SECOND PART OF CULTURE READING IN THE
COMMUNITY ENVIRONMENT IN THE IMPLEMENTATION OF
LITERATION PROGRAMS IN THE DISTRICT OF TELUK MENKKGKUDU
DISTRICT, SERDANG BEDAGAI*

BY:

Name : MUHAMMAD ARIEF ADILLAH
NPM : 181808025
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing 1 : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Pembimbing 2 : Dr. Nina salmaniah Siregar, M.Si

Reading culture is an effort to improve the quality of human resources (HR) carried out by local and village governments. Thus the literacy program is a basic and planned effort to realize cooperative and potential human resources. Based on the local regulation policy on reading culture in the community has a very important role in the development of quality, educational facilities and the ability of the community in the district.

The purpose of this study is to find out how the implementation of reading culture in the community environment in the implementation of literacy programs. The research method used in this thesis is a descriptive method with qualitative data processing, the method used to dissect a phenomenal field and describe the findings in the field. Source of data used comes from primary data and secondary data

From the results of the study or data analysis of the results of interviews about these aspects, it was concluded that the Culture of Reading in the Community In the implementation of the Literacy program in the District of Teluk Mengkudu. still less effective, and less than optimal. due to the lack of parties responsible for the implementation of the Literacy program as well as debgan there is no standard and mutually agreed guidelines and references, and also very minimal public participation, and the lack of facilities and infrastructure that supports the Literacy program in the Teluk Mengkudu District.

Keywords: Reading Culture, Literacy Program.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada program pascasarjana Universitas Medan Area, Sumatera Utara. Penulis memilih tesis ini berjudul : **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Dilingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai”**. Penulis menyadari dalam menyelesaikan tesis ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda penulis Khaidir, S.E dan Ibunda tercinta Siti Zubaidah yang telah memberikan kasih sayangnya berupa bimbingan, semangat serta doa yang tak berhenti mengiringi langkah penulis. Terimakasih atas pendidikan hidup dan pengorbanan yang telah

mereka dedikasikan dengan ikhlas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat-Nya.

2. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc** selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Yang terhormat, ibu **Prof. Dr. Retna Astuti K, MS** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Yang terhormat, Bapak **Dr. Abdul Kadir, M.Si** selaku Ka Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
5. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si** selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan dengan kesabaran memberikan bimbingannya kepada penulis.
6. Yang terhormat, ibu **Dr. Nina Salmaniah Siregar M.Si** selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan dengan kesabaran memberikan bimbingannya kepada penulis.
7. Dosen – dosen dan seluruh staff pengajar di Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Ucapan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai
9. Ucapan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai
10. Ucapan terima kasih kepada camat serta seluruh aparturnya dan kepala desa serta aparaturnya yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai

11. Sahabat yang penulis sayangi yaitu Nisaul Mardiah Tanjung, yang telah banyak menemani penulis dalam penyelesaian tesis ini. Yang telah banyak berkorban untuk mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Magister Administrasi Publik
12. Sahabat seperjuangan Magister Administrasi Publik, yang selalu memberikan semangat selama menyusun tesis.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Maret 2020

Yang menyatakan,

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori-Teori yang mendukung	9
a. Pengertian Implementasi.....	9
b. Pengertian Kebijakan.....	10
c. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
d. Karakteristik Kebijakan Publik	11
e. Komponen-Komponen Kebijakan publik	12
f. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	12
g. Unsur-Unsur Kebijakan Publik	13
h. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik.....	14

viii

i. Variable Pencapaian Keberhasilan Implementasi Kebijakan	15
j. Pengertian Membaca	16
k. Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca.....	17
l. Upaya Menumbuhkan Minat Baca	18
m. Faktor Yang Menjadi Penyebab Kondisi Rendahnya Kemampuan Membaca Masyarakat	18
n. Pengertian Literasi.....	19
o. Komponen Program Literasi	21
2.2. Penelitian Terdahulu.....	22
2.3. Kerangka pemikiran	30
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	31
3.2. Jenis Penelitian	31
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4. Teknis Analisa Data	35
3.5. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.1. Kabupaten Serdang Bedagai Sebagai Kabupaten Literasi.....	38
4.1.2. Lokasi dan Keadaan Geografis	40
4.1.3. Pemerintahan Kecamatan Teluk Mengkudu	41
4.1.4. Tujuan Fokok Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan.....	41

B. Fungsi Pemerintah Kecamatan.....	44
4.1.5. Pemerintahan Desa Kecamatan Teluk Mengkudu	54
4.1.6. Struktur Pemerintahan Desa.....	56
4.1.7. Tujuan Fokok Dan Fungsi Pemerintah Desa.....	59
4.1.8. Kependudukan	62
4.2. Pembahasan.....	66
4.2.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Budaya Membaca	
Di Kecamatan Teluk Mengkudu	66
4.2.2. Sumber Daya Pelaksanaan Budaya Membaca	
Di Kecamatan Teluk Mengkudu	68
4.2.2.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Budaya Membaca	
Di Kecamatan Teluk Mengkudu	68
4.2.2.2. Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Di Teluk Mengkudu	72
4.2.2.3. Anggaran Dalam Mendukung Budaya Membaca	
Di Kecamatan Teluk Mengkudu	77
4.2.3. Disposisi Dalam Mendukung Budaya Membaca	
Di Kecamatan Teluk Mengkudu.....	79
4.2.3.1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Budaya Membaca	
Di Kecamatan Teluk Mengkudu	80
4.2.3.2. Pelaksana Program Budaya Membaca Tingkat	
Kabupaten Serdang Bedagai	82
4.2.4. Struktur Birokrasi Dalam Pelaksanaan Budaya Membaca	
Di Kecamatan Teluk Mengkudu	83
4.2.4.1. Standar Operasional Prosedur Dalam Pelaksanaan Budaya	
Di Kecamatan Teluk Mengkudu	84

x

4.2.5. Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Budaya Membaca	
Di Kecamatan Teluk Mengkudu	86
4.2.6. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Budaya Membaca	
Di Kecamatan Teluk Mengkudu	90

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

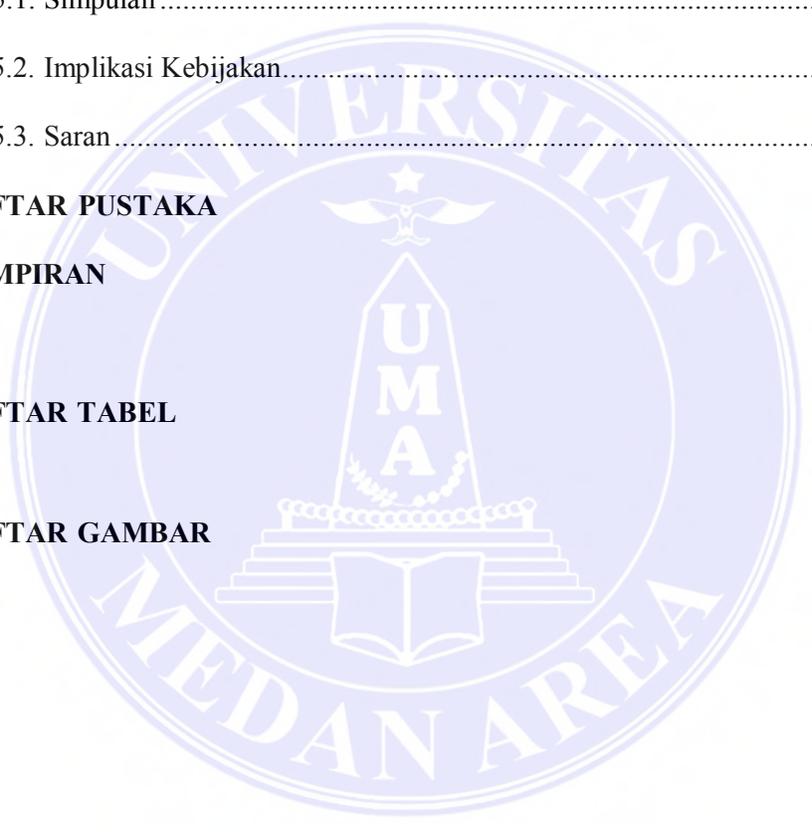
5.1. Simpulan	95
5.2. Implikasi Kebijakan.....	96
5.3. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Membaca merupakan satu kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Adapun beberapa pendapat menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defenisi membaca yaitu melihat dan paham isinya, bisa dalam melisankan atau dalam hati saja. Membaca juga suatu kegiatan meresepsi, menganalisis, dan menginterpretasi yang di lakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak di sampaikan oleh penulis dalam media tulisan.

Menurut Christina (2019:11), Membaca merupakan suatu keterampilan dalam mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk hurup, kata dan kalimat dalam bacaan guna memperoleh informasi yang terdapat didalamnya.

Aktivitas membaca bagi sebagian masyarakat memang belum membudaya, apalagi untuk mengajarkan anak-anak membaca mulai usia dini. Seharusnya budaya membaca ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga

Menurut Teale, Sulzby (1986). (dalam Kusmana 2016) Literasi secara luas diartikan sebagai kemampuan berbahasa yang mencakup kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis serta kemampuan berpikir yang menjadi elemen-elemen didalamnya.

Maka dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan daya guna untuk dapat bersaing di era globalisasi. Dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang dapat mencetak generasi muda yang potensial dan

kompeten. Sehingga pemerintah daerah kabupaten Serdang Bedagai mengambil kebijakan tentang budaya membaca dalam pelaksanaan program literasi di masyarakat, agar masyarakat memiliki kemampuan untuk bersaing dan memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kecamatan Teluk Mengkudu.

Dengan demikian program literasi adalah suatu usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cooperative dan potensial.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terus berupaya mendorong budaya literasi gemar membaca dilingkungan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan Deklarasi Gerakan Budaya Membaca serta Pemecahan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori menulis resensi buku bacaan secara massal pada November 2015 lalu.

Soekirman Bupati Serdang Bedagai menyampaikan dalam kegiatan talk show salah satu televisi swasta bertajuk “Membudayakan Literasi di Sekolah” di Cafe Ulos Hotel Santika Dyandra Medan, Selasa (14/6/2016) Mengatakan :
“Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat dimana salah satunya adalah dengan memberikan layanan pendidikan berkualitas, dengan mendorong warga sekolah khususnya dan masyarakat Serdang Bedagai umumnya untuk gemar membaca,”

Dalam hal membudayakan literasi gemar membaca, Kabupaten Serdang Bedagai mendapat dukungan dari USAID Prioritas dengan penghargaan atas kepedulian dalam mengimplementasikan seluruh program USAID prioritas selama tiga tahun, sejak tahun 2014-2017 dan juga menerima hibah Buku Bacaan

Berjenjang. Di Kabupaten Tanah BERTUAH Negeri Beradat ini sendiri telah mempunyai 10 Taman bacaan di 9 kecamatan, perpustakaan desa dan kelurahan serta 9 warung pintar, kemudian mempunyai siswa SD sebagai juara bercerita tingkat nasional dari Pantai Cermin dan da'i muda tingkat nasional.

Begitupula salah satu kunci penting untuk memenangkan kompetensi masa depan adalah semua anak bangsa harus memiliki kemampuan SDM yang unggul, berkarakter (jati diri) sekaligus juga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sejalan dengan Nawacita, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar,”

Dan untuk memenuhi program literasi maka pemerintahan daerah mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat, dalam mengikut sertakan pemerintah desa dan dusun serta organisasi masyarakat untuk dapat melaksanakan program literasi.

Teluk Mengkudu adalah satu dari tujuh belas kecamatan yang ada di kabupaten Serdang Bedagai. Dan 9 diantara kecamatan yang melaksanakan Literasi. Kecamatan Teluk Mengkudu terdiri dari 12 desa, dan 66 dusun.

Keadaan alam letak Kecamatan Teluk Mengkudu memanjang menyusuri Pantai Selat Malaka yakni dari perbatasan Kecamatan Tanjung Beringin sampai perbatasan Kecamatan Perbaungan, dengan panjang pantai sekitar 8 (delapan) km. Dari 12 desa yang ada di Kecamatan Teluk Mengkudu, 4 desa terletak di pinggir Selat Malaka, yakni Desa Pekan Sialang Buah, Desa Sentang, Desa Bogak Besar

dan Desa Pematang Kuala. Dari Pantai Selat Malaka Kecamatan Teluk Mengkudu mengarah ke Selatan melintasi jalan negara Medan-Tebing Tinggi dengan keadaan tanah mendatar dan subur yang menjadi areal pertanian dan perikanan/tambak udang. Hasil pertanian dan penangkapan ikan ini merupakan mata pencaharian utama masyarakat Teluk Mengkudu. Penduduk Kecamatan Teluk Mengkudu pada 2015 berjumlah 42.029 jiwa diperoleh dari hasil proyeksi BPS Kabupaten Serdang Bedagai, dengan kepadatan 628 jiwa/km², dan rumah tangga sebanyak 9941. Klasifikasi desa di Kecamatan Teluk Mengkudu tahun 2015 terdiri dari 4 DSesa Swakarya dan 8 Desa Swasembada. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Teluk mengkudu sebagian besar hidup dari sektor pertanian, baik sebagai petani tanaman pangan maupun sebagai buruh/karyawan perkebunan dan nelayan penangkapan ikan di laut.

(BPS kabupaten Serdang Beagai,2017)

Namun kondisi yang ada di masyarakat teluk mengkudu saat ini adalah :

1. Kesadaran yang sangat rendah tentang pentingnya membaca. Masyarakat beranggapan membaca tak mendatangkan manfaat dan keuntungan. Lebih baik bekerja, jelas menghasilkan uang.
2. Harga buku yang terlampau mahal. Dan minimnya fasilitas membaca seperti perpustakaan desa.
3. Minimnya penghargaan terhadap karya tulis.
4. Peranan orang tua yang sangat rendah dalam mengawal serta mengawasi program literasi pada anak-anak.

5. Budaya bercerita dan megobrol di warung-warung lebih disukai daripada budaya membaca

Maka untuk memotivasi dan menunjang kemampuan serta potensi masyarakat di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Dibutuhkan program-program yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Seperti program literasi, sehingga dengan adanya dan berjalannya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan kualitas hidup dari segi pendidikan dan ekonomi.

Ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program literasi yang dilaksanakan di kecamatan Teluk Mengkudu yaitu :

1. Ketiadaan sarana dan prasarana. Seperti tidak tersedianya perpustakaan desa yang layak atau perpustakaan daerah yang tersedia di desa. Oleh sebab itu minat pembaca di masyarakat cukup minim. Masyarakat desa yang tidak memiliki buku akibat perekonomian yang cukup lemah, dan akan kesulitan untuk mendapat buku bacaan.
2. Peran pemerintah daerah, desa serta dusun yang belum efektif dalam mensukseskan program literasi di masyarakat desa baik dalam perencanaan serta pengawasan terhadap program literasi. Seharusnya program literasi dapat memberi pengaruh yang besar dalam peningkatan potensi masyarakat di Kecamatan Teluk Mengkudu.
3. Peranan masyarakat serta lingkungan masyarakat pesisir yang memiliki pendidikan yang cukup rendah, serta lingkungan yang kurang produktif. Sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program literasi

di kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Karena di masyarakat pesisir hanya memiliki mindset bekerja dan mendapatkan gaji. Tanpa mementingkan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan prestasi kerja, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan.

Dengan adanya masalah yang di hadapi saat ini tentang pelaksanaan program literasi di Kecamatan Teluk Mengkudu, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai budaya membaca di lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan program literasi dengan judul :

‘Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah peneliti adalah:

1. Apakah faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai?

2. Apakah faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai orientasi dan tujuan yang hendak dicapai.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai?

1.4 Manfaat penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu manfaat antara lain :

1. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberi suatu masukan untuk berbagai pihak khususnya pada pemerintah Desa di Kecamatan Teluk mengkudu dalam pelaksanaan program literasi.

2. Akademisi

- a. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitian mengenai pelaksanaan program literasi.

- b. Bagi penulis, selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, juga menjadi media menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu administrasi publik. Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat berpikir analisis dan dinamis di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori-Teori Yang Mendukung

A. Pengertian Implementasi

Menurut Salusu (2015:218) Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas.

Menurut Dedy mulyadi (2018:12) Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan yang baik yang dikehendaki ataupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.

3. Penyediaan layanan

Menurut Gordon (dalam Mulyadi 2018:24) Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Dari berbagai definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya.

B. Pengertian Kebijakan

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat. Dan memiliki kerja sama antara pemerintah dengan swasta dalam proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan.

C. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut W.I. Jenkins (dalam Uddin dan Sobirin 2017:35) Kebijakan Publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.

Menurut Deddy Mulyadi (2018:37) Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencaai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggara tugas pemerintahan negara.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidak akan efektif.

D. Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Uddin B.Sore dan Sobirin (2018:35) beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (*publik problem solving*).
2. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan.
3. Merupakan fungsi pemerintahan sebagai pelayan publik.
4. Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan apa-apa.

E. Komponen-Komponen Kebijakan Publik

Menurut Charles O. Jones (1996). (dalam Susila 2015: 38) mengatakan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen :

1. Goal atau tujuan yang diinginkan.
2. Plans atau proposal, yaitu untuk mencapai tujuan.
3. Program, yaitu upaya dan wewenang untuk mencapai tujuan.
4. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Efek yaitu akibat-akibat dari program baik sengaja maupun tidak, primer dan sekunder.

F. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2012:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu(kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Chase (1979), (dalam Susila 2015:41) Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administrative yang dilakukan setelah ketetapan telah ditetapkan dan di setujui.

G. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan, formulasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu:

1. Tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama dengan tujuan.

2. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagai masalah yang tidak benar.
3. Tuntutan yang muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses permusuhan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan.
4. kepentingan mereka.
5. Dampak yang merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat daripada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
6. Sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa sarana ini antara lain, kekuasaan, isentif.

H. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik

Menurut George R.Terry (dalam Mulyadi 2018:27) faktor-faktor pendukung imlementasi kebijakan publik mengacu pada enam sumberdaya pokok mnajemen:

1. *Men (human Resources)*, dalam manajemn publik, sumber daya manusia tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karir.
2. *Money (finances)*, dalam manajemen publik, money sangat terkait dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yan telah disetujui terlebih dahulu.
3. *Material (logistik)*
4. *Machine (information)*, manajemen publik dikelola melalui informasi yang terbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.
5. *Methods (legitimate)*, keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting. Dalam manajemen publik dikenal dengan persetujuan atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. *Market (participation)*, partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat berupa penolakan. Keduanya merupakan masukan uang diperlukan dalam proses implementasi kebijakan publik.

I. Variable Pencapaian Keberhasilan Implementasi Kebjiakan

Menurut Edward (dalam Mulyadi 2018:28), menunjukan pada empat variable yang berperan penting dalam pencpaian keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Kounikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunksi efektif anantara pelaksana program (kebijakan) dengan kelomok sasaran (target group). Tujuan

dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

2. Sumber Daya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor untuk dapat mencukupi sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan.
3. Disposisi yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan. Adapun karakter implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
4. Struktur Birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur mencakup dua hal penting. Mekanisme, dan struktur organisasi. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedure* (SOP).

J. Pengertian Membaca

Membaca merupakan satu kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Adapun beberapa pendapat menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi membaca yaitu melihat dan paham isinya, bisa dalam melisankan atau dalam hati saja. Membaca juga suatu kegiatan meresepsi, menganalisis, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan.

Menurut Christina (2019:11) Membaca merupakan suatu keterampilan dalam mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk huruf, kata dan kalimat dalam bacaan guna memperoleh informasi yang terdapat didalamnya.

Menurut Darmono (2001), (dalam Saefuddin 2015:274) minat baca merupakan kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap membaca. Minat baca ditunjukkan dengan keinginan yang kuat untuk melakukan kegiatan membaca. Orang yang demikian senantiasa haus terhadap bacaan. Minat membaca sangat berpengaruh terhadap keterampilan membaca.

Menurut Rahim (2007), (dalam periyati 2017:55), membaca merupakan keterampilan yang diperoleh setelah seseorang dilahirkan, bukan keterampilan bawaan yang dapat dikembangkan, dibina dan dipupuk melalui kegiatan belajar mengajar.

K. Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca

Menurut Christina (2019:21) kemampuan anak dalam membaca dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor fisiologis, mencakup kesehatan fisik
2. Faktor intelektual, mencakup proses berpikir dan memecahkan masalah
3. Faktor lingkungan, lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap dan kemampuan bahasa anak.
4. Faktor sosial ekonomi, status sosial ekonomi orangtua berpengaruh pada kemampuan verbal anak. Semakin tinggi status sosial ekonomi orangtua maka semakin bagus kemampuan verbal anak.

5. Faktor psikologis, mencakup motivasi dan minat anak dalam membaca.
6. Bahan bacaan, bahan bacaan dapat disesuaikan terhadap kemampuan anak.

L. Upaya Menumbuhkan Minat Baca Di Masyarakat

Menurut Witanto (2018:15) upaya menumbuhkan minat baca di masyarakat adalah:

1. Meningkatkan layanan perpustakaan di sekolah dan lingkungan masyarakat.
2. Memperbaharui sistem pembelajaran di sekolah.
3. Membudayakan cinta baca mulai dari keluarga
4. Mengontrol penggunaan media elektronik (TV, video game, handphone, internet).

M. Faktor Yang Menjadi Penyebab Kondisi Rendahnya Kemampuan Membaca Masyarakat

Menurut Witanto (2018:7), faktor yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan membaca di masyarakat :

1. Permasalahan di dalam lingkungan sekolah. Seperti :
 - A. Terbatasnya sarana dan prasarana.
 - B. Situasi pembelajaran yang kurang memotivasi siswa untuk mempelajari buku-buku tertentu di luar buku-buku paket.

- C. Kurangnya model (dari kalangan guru) bagi siswa dalam hal membaca.
2. Permasalahan di luar lingkungan sekolah
- A. Berkembangnya teknologi informasi, menggeser minat masyarakat terhadap aktivitas membaca buku. Gencarnya siaran Televisi.
- B. Banyaknya keluarga yang belum menanamkan tradisi wajib membaca.
- C. Berkembangnya teknologi ‘jempol’ (handphone dan internet), menggeser minat manusia terhadap buku.
- D. Keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap buku.

N. Pengertian Literasi

Secara bahasa, literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Dalam bahasa Inggris, *literacy* artinya kemampuan membaca dan menulis dan kompetensi atau pengetahuan di bidang khusus.

Menurut Teale, Sulzby (1986). (dalam Kusmana 2016) Literasi secara luas diartikan sebagai kemampuan berbahasa yang mencakup kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis serta kemampuan berpikir yang menjadi elemen-elemen didalamnya.

Menurut Alberta (2009), arti literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis namun menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki kemampuan berfikir kritis,

mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Education Development Center (EDC) literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis, melainkan kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan keterampilan (*skills*) yang dimiliki dalam hidupnya. Dengan pemahaman bahwa literasi mencakup kemampuan membaca kata dan membaca dunia.

Pemahaman yang paling umum dari literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu di peroleh dan dari siapa memperolehnya.

Menurut UNESCO, pemahaman tentang makna literasi sangat di pengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan pengalaman. Kemampuan literasi merupakan hak setiap orang yang merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat.

Menurut National Literacy Forum (2014), bahwa ada empat cara yang di lakukan dalam membangun literasi yang universal yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan bahasa sejak dini di rumah dan dalam pendidikan non formal
2. Mengefektifkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan keterampilan membaca dan menulis di sekolah

3. Adanya akses untuk membaca dan program untuk membaca dan program yang membuat anak merasa senang melakukan kegiatan literasi
4. Menciptakan kerjasama antar sekolah, lingkungan, keluarga dan lingkungan kerja untuk dapat mendukung budaya literasi

Kampung literasi merupakan salah satu program direktorat pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berpengatahuan, berkecakupan, maju, dan mandiri melalui kegiatan membaca dan belajar agar memiliki pemahaman yang luas. Keberadaan kampung literasi akan memberikan perluasan akses informasi kepada masyarakat, menumbuhkan dan membudayakan minat baca, mengembangkan sikap positif, dan mengembangkan keterampilan. Hal ini juga sebagai wujud dalam menciptakan masyarakat pembelajar sepanjang hayat (*life long learning*).

O. Komponen Program Literasi

Dengan menggunakan jaringan rumah baca yang tersebar dalam lingkup kecil kehidupan sosial masyarakat (di tingkat dusun), proyek desa literasi di desain sedemikian rupa untuk bisa melibatkan segenap unsur potensial yang ada di dalam masyarakat agar dapat turut serta dalam penyediaan maupun terlibat langsung pelaksanaan kegiatan pembelajaran alternatif yang terangkum dalam 9 indikator desa literasi antara lain:

- 1) Satu Dusun , Satu Rumah Baca
- 2) *School of parenting* (sekolah pengasuhan bagi orang tua)

- 3) *Street shop* (bazar amal barang layak pakai untuk komunikasi tertarget)
- 4) Panggung literasi (media aktualisasi minat dan bakat masyarakat)
- 5) Satu desa (inkubasi informasi ide dan inovasi pembangunan desa)
- 6) *Eco literasi* (gerakan kepedulian lingkungan alam pedesaan)
- 7) Sekolah relawan (rekrutmen dan upgrading relawan baca)
- 8) *Kids zone* (taman ramah anak)
- 9) *Liter Art* (pendidikan karakter berbais seni dan budaya)

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Drs. Hari Santoso, S.Sos. (2015), dengan judul penelitian : Upaya Meningkatkan Minat dan Budaya Membaca Buku Melalui Iklan Layanan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Iklan Layanan masyarakat sangat membantu untuk meningkatkan minat dan budaya membaca kepada masyarakat. Melalui pesan-pesan yang dikemas secara kreatif dalam seni visual tidak lepas dari unsur perandesain komunikasi visual. Dalam kehidupan sehari-hari desain komunikasi visual sangat signifikan sebagai sumber informasi atas keberadaan produk dan jasa. Maka untuk menunjang terwujudnya tujuan dari ILM dalam meningkatkan minat dan budaya membaca buku, diperlukan kebijakan dari pemerintah yang memberi kemudahan-kemudahan dalam penerbitan buku serta kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai sumber informasi yang dibutuhkan. Disamping itu perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat diharapkan secara proaktif

melakukan kerjasama sinergis terutama dalam menjangkau semua lapisan masyarakat dengan memberi kesempatan untuk dapat mengakses berbagai sumber informasi sehingga kehadirannya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh sebab itu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun minat dan budaya membaca buku di lingkungan keluarga. Jika terjadi gerakan membaca buku di lingkungan keluarga, sudah barang tentu hal tersebut akan cepat menjadi gerakan masyarakat dan jika hal tersebut terjadi maka tujuan dari ILM dalam membangun minat dan budaya membaca buku akan terwujud.

2. Khotijah Kamsul (2017), dengan judul penelitian : Strategi Pengembangan Minat dan Gemar Membaca

Masalah kegemaran membaca perlu dilihat secara menyeluruh. Masalah minat dan kegemaran membaca ini tidak berdiri sendiri. Secara historis kita harus lihat lingkungan tempat tinggal seseorang sejak kanak-kanak. Yang paling mudah adalah dengan cara melihat lingkungan keluarga sekitar kita tinggal. Bagaimana sebagian besar keluarga di sekitar kita membina minat baca anak-anaknya. Kita bisa perhatikan kebiasaan anak-anak pada hari minggu. Sebagian besar anak-anak akan berada di depan TV sejak pukul 07.00 sampai paling tidak pukul 10.00 atau bahkan lebih. Hampir tidak ada anak yang tekun membaca pada jam-jam tersebut. Hasil penelitian Saleh dkk (1995 dan 1996) melaporkan bahwa sebagian besar orang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk nonton TV dibandingkan dengan membaca (sebagian besar nonton lebih dari 3 jam sedangkan membaca sebagian besar kurang dari 1 jam setiap hari). Bahan bacaannyapun sebagian besar

hanya membaca koran dan majalah. Tidak terlalu banyak orang yang membaca buku. Ini merupakan salah satu bukti bahwa minat membaca masyarakat Indonesia masih kalah dibandingkan dengan minat menonton. Bukti lain yang menunjukkan bahwa minat baca dikalangan kaum intelektual juga masih rendah adalah data kunjungan ke perpustakaan oleh mahasiswa yang memperlihatkan betapa sedikitnya mahasiswa yang memanfaatkan perpustakaan. Data dari beberapa perpustakaan perguruan tinggi menunjukkan bahwa pengunjung perpustakaan tersebut tidak lebih dari 10 % dari jumlah mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa berkunjung ke perpustakaan tidak lebih dari 1 kali dalam sebulan. Mahasiswa lebih suka berkumpul di kantin daripada di perpustakaan. Terlepas dari itu segala suasana suram dalam dunia minat baca, perlu dipahami bahwa perubahan dari budaya dengar dan lisan ke budaya membaca dan menulis, diperlukan langkah-langkah yang strategis dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, membaca dan kebiasaan membaca umumnya diperoleh melalui pengalaman belajar membaca. Pengembangan Minat dan Gemar Membaca Minat baca dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi kepada sesuatu sumber bacaan tertentu. Sedangkan budaya baca adalah suatu sikap dan tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Seseorang yang mempunyai budaya baca adalah orang yang telah terbiasa dalam waktu yang lama di dalam hidupnya selalu menggunakan sebagian waktunya untuk membaca. Budaya baca merupakan persyaratan yang sangat penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara apabila ingin menjadi bangsa yang maju. Melalui budaya baca, mutu pendidikan dapat

ditingkatkan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui budaya baca pulalah pendidikan seumur hidup (life long education) dapat diwujudkan, karena dengan kebiasaan membaca seseorang dapat mengembangkannya sendiri secara terus menerus sepanjang hidupnya. Dalam era informasi sekarang ini, mustahil kemajuan dapat dicapai oleh suatu bangsa jika bangsa itu tidak memiliki budaya baca. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan mencerdaskan bangsa secara cepat dan merata perlu dibina kebiasaan membaca masyarakat. Karena kegiatan membaca merupakan kegiatan belajar dan merupakan kegiatan integral dari kegiatan pendidikan, maka tanggung jawab pengembangannya adalah pada keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pihak-pihak yang ikut bertanggungjawab dalam segi pendidikan yaitu orang tua, guru, pengarang, penerbit, toko buku dan pemerintah. Dalam situasi sekarang dimana kemauan dan kemampuan beli masyarakat masih rendah, maka peranan pemerintah akan sangat menentukan berhasil tidaknya mengembangkan kegiatan dan minat baca. Untuk kepentingan tersebut tidak perlu setiap individu di dalam masyarakat harus memiliki/membeli setiap buku yang diterbitkan. Yang diharapkan adalah tumbuhnya minat baca dan adanya kesempatan bagi setiap individu dalam masyarakat untuk dapat membaca dan mengembangkan kebiasaan membaca. Kesempatan ini dapat diusahakan oleh pemerintah dengan penyelenggaraan perpustakaan. Tujuan pembinaan minat baca adalah untuk menciptakan masyarakat membaca (reading society), masyarakat belajar (learning society) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditandai dengan tercipta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai piranti

pembangunan nasional menuju masyarakat madani¹⁰. Sasaran pembinaan yang dituju adalah masyarakat secara keseluruhan dalam berbagai lapisan yang ada meliputi segala usia, jenis kelamin, jenis dan jenjang pendidikan, jenis pekerjaan atau profesi, dan sebagainya. Menurut Frans M. Parera¹¹, kebijakan pembinaan minat baca masyarakat diarahkan melalui lima jalur, yaitu : (1) Pembinaan melalui jalur rumah tangga dan keluarga, (2) Pembinaan melalui jalur masyarakat dan lingkungan (luar sekolah), (3) Pembinaan melalui jalur pendidikan (sekolah), (4) Pembinaan melalui jalur instansional (perkantoran), dan (5) Pembinaan melalui jalur instansi secara fungsional (perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota). Selanjutnya dalam menetapkan pola pembinaan minat dan kebiasaan membaca tidak lagi memikirkan keluarga, masyarakat dan pemerintah, akan tetapi memfokuskan perhatian pada pembinaan secara khusus terhadap individu-individu dan sasaran utama adalah anak balita dan remaja, mulai anak usia 1 (satu) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.

3. Abdul Holik (2013), dengan judul penelitian : Peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sudut Baca Soreang Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat di Kabupaten Bandung.

Kehadiran TBM di tengah tengah masyarakat dengan berbagai jenis kegiatannya telah memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat dalam mengakses ilmu pengetahuan, menggali dan menganalisa informasi yang dibutuhkan serta sebagai tempat rekreasi keluarga yang aman. Selain itu TBM pun berfungsi sebagai lembaga pendidikan nonformal yang secara langsung

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan pendidikan sepanjang hayat. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat sekitar TBM dapat dengan mudah diperoleh. Mulai dari pendidikan keluarga, pendidikan anak dan remaja, kisah kisah teladan hingga buku pelajaran anak anak sekolah. Cara yang digunakan pengelola agar pengunjung dengan mudah memperoleh bahan bacaanya melalui daftar buku referensi yang telah disusun. Selain itu Tempat baca yang nyaman serta layanan ramah dari pengelola menjadikan minat baca masyarakat semakin kuat. Peningkatan minat baca masyarakat di sekitar TBM terlihat dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung ke TBM dalam perminggunya. Kunjungan tersebut ada yang bersifat resmi atau kunjungan biasa. Jika minat kunjungan masyarakat dapat dijaga secara langsung akan mempengaruhi minat baca masyarakat di TBM, tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat akan meningkat bahkan tidak tertutup kemungkinan akan menambah jumlah penduduk yang melek huruf setiap tahunnya. Artinya TBM dapat membantu pemerintah dalam menuntaskan agenda buta huruf masyarakat. Berdasarkan hasil temuan, kontribusi kemampuan manajerial dalam meningkatkan minat baca masyarakat terlihat dari wawasan dan pemahaman masyarakat tentang TBM. bahwa masyarakat antara lain; (1) TBM merupakan salah satu sumber informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dengan mudah, (2) TBM adalah media penghubung antara sumber informasi dengan masyarakat pengguna, (3) TBM dapat berperan sebagai lembaga pendidikan nonformal yang dapat digunakan masyarakat dalam menggali, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, (4) TBM adalah lembaga

yang dapat meningkatkan minat baca, kebiasaan membaca, membudayakan membaca dan meningkatkan kemampuan membaca masyarakat,(5) TBM dengan rutinitas kegiatan yang diperuntukan untuk semua kalangan dapat berperan dalam mengurangi dan mencegah kenakalan remaja.

4. Agus Marwan dengan judul penelitian : Implementasi Kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai dalam Meujudkan Kabupaten Literasi

Berbagai kegiatan Literasi dilakukan di berbagai level, baik itu di pemerintahan tingkat kabupaten Serdang Bedagai maupun di level sekolah. Berikut daftar Literasi yang telah dilaksanakan.

- a. Deklarasi Gerakan Budaya Membaca yang melibatkan siswa, guru, orang tua murid.
- b. Sosialisasi dan koordinasi. Kegiatan melibatkan stakeholder.
- c. Program 15 menit membaca sebelum jam pelajaran sekolah dimulai
- d. Revitalisasi dan pembinaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- e. Pengadaan dan pembinaan perpustakaan di kecamatan.
- f. Pengadaan dan Pembinaan masyarakat desa.
- g. Mendukung dan membina perpustakaan rumah ibadah.
- h. Program jam belajar masyarakat
- i. Pengadaan buku dan memperluas akses membaca
- j. Launcing buku dari penulis lokal.
- k. Bedah buku

- l. Pengadaan bahan bacaan yang melibatkan swasta dan masyarakat
- m. pengadaan mobil perpustakaan keliling
- n. Terus mensosialisasikan Perda No 7 terkait Literasi

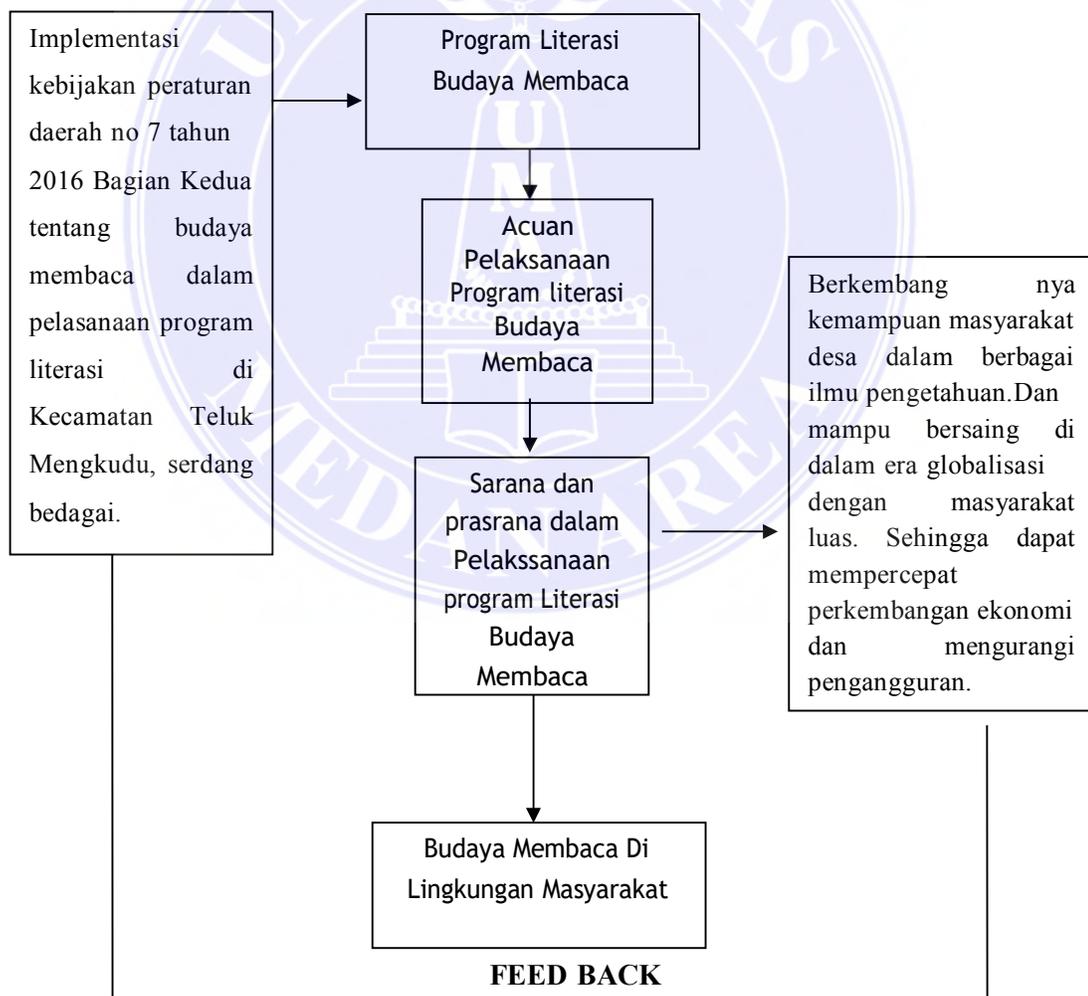


2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3.1

KERANGKA PEMIKIRAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Budaya Membaca.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Waktu penelitian akan diadakan pada bulan desember 2019 sampai february 2020.

3.2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Demikianlah menurut moleong (2007:103) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen.

- 1) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci dengan melihat gejala dan permasalahan yang ada.
- 2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau praktek yang berlaku.
- 3) Membuat perbandingan atau evaluasi.

- 4) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian Kepustakaan adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan memperoleh informasi melalui buku-buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan dilakukan dalam mencari data informasi dimana penelitian dilakukan secara langsung kelapangan secara langsung dengan cara sebagai berikut:

- A. Obsevasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti.
- B. Wawancara (interview) yaitu cara yang dilakukan peneliti kepada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Teluk Mengkudu dan Desa. Adapun informan sebagai berikut:

1. Camat Teluk Mengkudu

Nama Narasumber : Romian Parulian Siagian S,STP, M.Si

Jabatan : Camat Teluk Mengkudu

Jenis Kelamin : Laki-Laki

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nama Narasumber : Khaidir S.E

Jabatan : Tokoh Masyarakat & Anggota DPRD
KabupatenSerdang Bedagai

Jenis Kelamin : Laki-Laki

3. Kepala Desa Sentang

Nama Narasumber : Salimuddin

Jabatan : Kepala Desa Sentang

Jenis Kelamin : Laki-Laki

4. Kepala Desa Bogak Besar

Nama Narasumber : Syahrums

Jabatan : Kepala Desa Bogak Besar

Jenis Kelamin : Laki-Laki

5. Kepala Desa Pematang Kuala

Nama Narasumber : Ramlan

Jabatan : Kepala Desa Pematang Kuala

Jenis Kelamin : Laki-Laki

6. Kepala Desa Pekan Sialang Buah

Nama Narasumber : Syahrrial
Jabatan : Kepala Desa Pekan Ssialang Buah
Jenis Kelamin : Laki-Laki

7. Kepala Desa Pasar Baru

Nama Narasumber : Suriadi
Jabatan : Kepala Desa Pasar Baru
Jenis Kelamin : Laki-Laki

8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Serdang Bedagai.

Nama Narasumber : dr. M. Rizki Ramadan Hasibuan
Jabatan : Ketua DPRD Serdang Bedagai
Jenis Kelamin : Laki-Laki

9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

Nama Narasumber : Drs. joni Walker Manik, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kabupaten Serdang Bedagai
Jenis Kelamin : Laki-Laki

C. Dokumentasi berupa foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi penelitian.

3.4. Teknis Analisis Data

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan batuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar.

Menurut Bungin (2012:196) analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil di kumpulkan oleh penelitian melalui perangkat metodologi tertentu.

Analisis data dimulai dengan mencari data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumentasi gambar, dan sebagainya.

Data yang telah diolah kemudian di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberi gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang di ajukan.

Setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh.

3.5. Defenisi Konsep Dan Defenisi Operasional

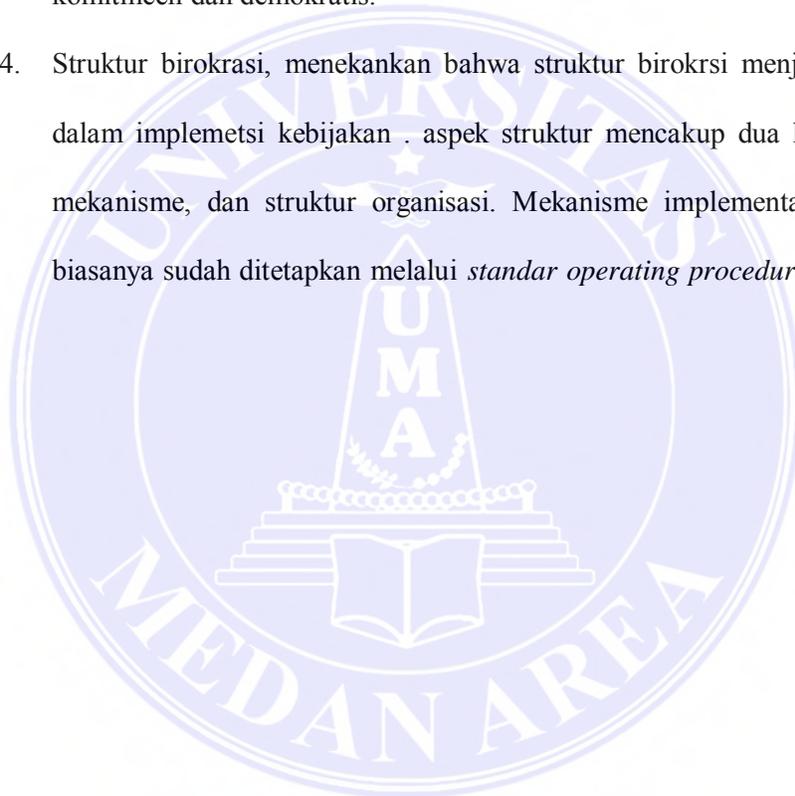
Defenisi Operasional Variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih *substantive* dari suatu konsep. Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefenisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variable yang ditelitinya. Defenisi Konseptual Variabel adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, adapun judul penelitian ini adalah: 'Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai.

Menurut Edward (dalam Mulyadi 2018:28), menunjukkan ada empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Kounikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunkasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distori atas kebijakan dan program.
2. Sumber daya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumbr daya manusia adalah kecukupan baik kualitas

maupun kuantitas implementor untuk dapat mencukupi sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan.

3. Disposisi yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan. Adapun karakter implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
4. Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. aspek struktur mencakup dua hal penting, mekanisme, dan struktur organisasi. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedure (SOP)*.



BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1. Simpulan

Pada hasil penelitian ini peneliti akan berusaha mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Dilingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun Kesimpulan nya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat adalah :

- a. Motivasi
- b. Sarana Dan Prasarana
- c. Inovasi Dalam Membuat Kenyamanan Dalam Membaca
- d. Dukungan Orang Tua
- e. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat
- f. Kesadaran Seluruh Masyarakat

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat adalah :

- a. Kemajuan tehnologi
- b. Lingkungan yang tidak kondusif
- c. Ekonomi yang masih tergolong rendah
- d. Masyarakat yang masih berpikir apatis

5.2. Implikasi Kebijakan

Adapun implikasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Dalam Pelaksanaan Program Literasi di Kecamatan Teluk Mengkudu. Bertujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam segala aspek. Dan diharapkan ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan juga kemampuan. Dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat. Karena pendidikan dinilai menjadi pemutus rantai kemiskinan yang ada di masyarakat. Maka kebijakan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Dalam Pelaksanaan Program Literasi di Kecamatan Teluk Mengkudu. Sangat memberikan pengaruh positif, terlebih pada masyarakat di Kecamatan Teluk Mengkudu. Agar kiranya masyarakat pesisir memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dapat membuka wawasan masyarakat. Sehingga dapat keluar dari belenggu kemiskinan.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dan kesimpulan. Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Adanya peraturan pemerintah untuk dapat mengatur jam belajar, begitupula wajib membaca kepada pelajar yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai terkhusus Kecamatan Teluk Mengkudu.
2. Pengadaan sarana dan prasarana yang memiliki kualitas dan standar serta berinovasi.

Dengan pengadaan perpustakaan yang memiliki fasilitas seperti ruangan ber AC dan kesedian buku yang bagus dan sesuai dengan kearifan local begitupula buku-buku yang terupdate, diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penanggung jawab yang bertanggung jawab.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam meumbuhkan minat baca dan pemerintah yang bertanggung jawab untuk dapat menjalankan perturan daerah terkait dengan komitmen dan tanggung jawab.

4. Adanya anggaran khusus untuk penyelenggaraan budaya membaca di desa.

Diharapkan pengelolaan dana desa dapat dialokasikan kepada pembangunan sumber daya manusia dengan menciptakan perpustakaan yang memiliki fasilitas yang baik.

5. Motivasi

Motivasi adalah kekuatan dan dorongan untuk menyadarkan dan menumbuhkan minat baca masyarakat. Hal ini dapat diberikan oleh pemerintah ataupun orangtua. Hal ini dapat berbentuk reward atau penghargaan. Begitupula keteladanan yang harus dimiliki oleh pemerintah dan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012, *Kebijakan Publik*, Salemba, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Serdang Bedagai, 2017 : *Kecamatan Teluk Mengkudu Dalam Angka*
- Bungin, Burhan. 2012, *Metodologi penelitian Kualitatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Christina 2019, *Mengajar Membaca Itu Mudah*, CV Alaf Media, Yogyakarta
- Darmadi 2018, *Membaca Yuk*, Guepedia.com, Bogor.
- Hajar Siti. Dkk 2018, *Masyarakat Pesisir*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, Medan.
- Kurniwan Heru, Dkk. 2018, *Literasi Parenting*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Meleong, Lexy J 2007, *Penelitian Kualitatif*, Mandar Maju, Jakarta
- Meliyawati, 2016, *Pemahaman Dasar Membaca*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Mulyadi Deddy, 2018, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Salusu. 2015, *Pengambilan keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Orgaisasi Non Profit*, PT Grasindo, Jakarta.
- Sulila Ismet. 2015, *Impementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Uddin B. Sore, Sobirin. 2017, *Kebijakan Publik*, CV Sah Media, Makassar.
- Wahab, Abdul Solichin, 2014 : *Analisi Kebijakan*, Bumi Aksara , Jakarta.

Wahab, Abdul Solichin, 2014 : *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta

Winarno, 2010, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Bumi Aksara, Jakarta.

B. Jurnal

Holik Abdul, 2013, *Peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sudut Baca Soreang Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat di Kabupaten Bandung*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3 No. 1.

Periyeti. 2017, *Usaha Meningkatkan minat Baca Mahasiswa*, Jurnal Pustaka Budaya, Vol. 4, No. 1

Permatasari Ane. 2015, *Membangun Kualitas Budaya Dengan Literasi*, Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB.

Saefuddin encang. 2015, *Tingkat Budaya Membaca Masyarakat*, Jurnal Kajian Informassi dan Perpustakaan, Vol. 3, No. 2, Hal 271-282

Setiaji Muhammad 2016, *Upaya Taman Bacaan Masyarakat Pangeran Diponegoro Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Di Dusun Sembego, Maguwoharjo, Sleman Yogyakarta*

Witanto Janan. 2018, *Minat Baca Yang Sangat Rendah*,

C. Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat

D. Internet

- <https://rumahliterasiindonesia.org/desa-liteasi-membangun-indonesia-dari-kampoeng-halaman/>
- <http://www.indonesiastudent.com/pengertian-literasi-menurut-para-ahli/>
- <http://donasibuku.kemdikbud.go.id/artikel/geliat-gerakan-indonesia-membaca-dan-kampung-literasi-2007>
- <Hhttp://hendriansdiamond.blogspot.co.id/2012/02/budaya-membaca-dan-pengertiannya.html?m=1>
- <https://www.google.co.id/search?q=menurut+nontji+2002&oq>
- <https://serdangbedagaikab.bps.go.id>



1. Desa Pematang Kuala

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

DESA PEMATANG KUALA

KECAMATAN TELUK MENKUDU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAPATAN Rp 1,350.960.596

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar Rp. 297.283.464. Digunakan untuk :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Penghasilan etap dan tunjangan kepala desa | Rp. 36,000,000,- |
| b. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa | Rp. 146,400,000,- |
| c. Tunjangan BPD | Rp. 42,600,000,- |
| d. Operasional pemerintahan desa | Rp. 43,083,104,- |
| e. Operasional BPD | Rp. 4,000,000,- |
| f. Asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan | Rp. 10,200,360,- |
| g. Rehap kantor desa | Rp. 15,000,000,- |

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 704,004,000,-digunakan untuk

:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Pembangunan sekolah | Rp. 235,194,00,- |
| b. Pengadaan mobil mobil pengakutan desa | Rp. 165,000,000 |
| c. Pembangunan perkerasan jalan | Rp. 283,810,000,- |
| d. Pembangunan Rabat Beton | Rp. 20,000,000,- |

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 60,300,000,- digunakan untuk :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Honorarium petugas kebersihan dan Rumput | Rp. 6.600,000,- |
| b. Hari besar nasional | Rp. 3,000,000,- |
| c. Pembinaan organisasi perempuan /pkk | Rp. 24, 500,000,- |
| d. Pembinaan LKMD /LPMD | Rp. 5,000,000,- |
| e. Insentif guru paud ,kader PPFM ,dll | Rp. 21,200,000,- |

4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 214,373,132,- digunakan untuk :

- | | |
|---|------------------|
| a. Kegiatan pelatihan kepada desa dan perangkat | Rp. 30,000,000,- |
| b. Kegiatan keagamaan | Rp. 6,127,132,- |
| c. Kegiatan pelatihan tata boga | Rp. 65,200,000 |
| d. Kegiatan pelatihan computer | Rp. 70,200,000, |
| e. Kegiatan sosialisasi hukum | Rp. 11,926,000,- |
| f. Kegiatan posyandu | Rp. 7,000,000,- |
| g. Insentif guru islam terpadu | Rp. 24,000,000,- |
| h. Penyertaan modal BUMDes bersama | Rp. 75,000,000,- |

2. Desa Pekan Sialang Buah

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(A P B Des)
DESA PEKAN SIALANG BUAH
KECAMATAN TELUK MENKUDU KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Dana Desa : Rp. 916.637.903,-
2. Dana Bagi Hasil Pajak : Rp. 32.842.344,-
3. Alokasi Dana Desa : Rp. 323.644.875,-
4. Pagu Dana Pilkades : Rp. 29.985.200,-

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:

Rp. 305.630.075,-

2. Bidang Pembangunan Desa:

Rp. 721.115.403,-

- a. Pembangunan Saluran Irigasi 325 M Dusun I :
Rp. 225.200.000,-
- b. Pembangunan Saluran Irigasi 176 M Dusun II :
Rp. 138.440.000,-
- c. Pembangunan Drainase /Spal 50 M Dusun III :
Rp. 21.280.000,-
- d. Pembangunan Drainase/Spal 158 M Dusun III :
Rp. 105.780.000,-
- e. Pembangunan Jalan Rabat Beton 125 M DUSUN V :
Rp. 58.751.000,-
- f. Pembangunan Sumur Bor 2 Unit :
Rp. 34.610.000,-
- g. Penyelenggaraan Posyandu :
Rp. 15.284.000,-
- h. Rehab Rumah Tidak Laya 5 Unit :
Rp. 75.000.000,-
- i. Pemasangan Lampu Jalan :
Rp. 16.800.000,-
3. Bidang Pembinaan Masyarakat : Rp. 36.543.344,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 227.781.000,-

3. Desa Pasar Baru

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA PASAR BARU
KECAMATAN TELUK MENGGUDU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAPATAN	:Rp. 1.256.292.085,
1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	:Rp. 251.936.350,-
a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa :	
RP. 36.000.000,-	
b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa :	
Rp. 121.200.000,-	
c. BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa :	
Rp. 1.087.668,-	
d. Operasional Pemerintahan Desa :	
Rp. 21.076.282,-	
e. Tunjangan BPD :	Rp. 51.000.000,-
f. Kegiatan PILKADES :	Rp.21.572.400,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:Rp.278.048.2238,-
a. Kegiatan paud	:Rp.16.895.838,-
b. . Insentif Guru Ngaji	:Rp.4.800.000,-

c. Penyelenggaraan Posyandu	:Rp.5.100.000,-
d. Pembangunan Drainase 100 M Dusun I	:Rp.17.410.400,-
e. Pembangunan Jalan Rabat Beton 145 M Dusun III	:Rp.62.618.000,-
f. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun III	:Rp.36.404.000,-
g. Pembangunan Jalan Usaha Tani 95 M Dusun III	:Rp.29.820.000,-
h. Rehap Rumah Tidak Layak Huni 7 Unit	:Rp.105.000.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp.28.720.497,-
a. Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan dan HUT RI	:Rp.2.920.497,-
b. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	:Rp.3.000.000,-
c. Pembinaan LKMD/LPMD	:Rp.6.000.000,-
d. Pembinaan	:Rp.16.800.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:Rp.297.587.000,-
a. Pembangunan Saluran Irigasi 200 M Dusun III	:Rp.111.180.000,-
b. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	:Rp.8.000.000,-
c. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	:Rp.18.000.000,-
d. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	:Rp.134.055.000,-
e. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	:Rp.26.352.000,-
5. Pembiayaan Sebesar	:Rp.400.000.000,-
a. Penyertaan Model BUMDes Bersama	:Rp.400.000.000,-

4. Desa Bogak Besar

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

DESA BOGAK BESAR

KECAMATAN TELUK MANGKUDU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

TAHUN 2019

PENDAPATAN

1. Dana Desa	:Rp. 812.049.747,-
2. Alokasi Dana Desa	:Rp. 309.481.204,-
3. Bagi Rasa Pajak dan Retribusi	:Rp. 44.258.725,-
Jumlah Pendapatan Desa	:Rp. 1.165.789.676,-
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar :	Rp. 302.113.725,-
Digunakan untuk:	
a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :	Rp. 151.800.00,-
b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa:	Rp. 55.800.000,-
c. Tunjangan BPD :	Rp. 51.000.000,-
d. Operasional Pemerintah Desa :	
	Rp.36.742.125,-

- e. Operasional BPD : Rp. 5.196.000,-
- f. Asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan : Rp. 1.575.600,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ,Sebesar : Rp. 358.662.747,-
digunakan untuk :
- a. Pembangunan Rabat Beton Dusun II Panjang 253x2,50 M :
Rp. 135.354.000,-
- b. Pembangunan Saluran Parit Dusun III panjang 52 M :
Rp. 18.663.468,-
- c. Pembangunan Saluran Parit Dusun VI Panjang 171 M :
Rp. 59.644.279,-
- d. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun I Panjang 186 M :
Rp. 145 000.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Sebesar : Rp, 21.626.204,-
digunakan untuk:
- a. Pembinaan Olahraga dan Pemuda : Rp. 5.000.000,-
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK : Rp. 9.026.204,-

- c. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna : Rp. 2.600.000,-
- d. Pembinaan LKMD/LPMD : Rp. 5.000.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sebesar : Rp.283.387.000,-
- a. Kegiatan Pelantikan Kepala Desa dan Perangkat: Rp. 30.000.000,-
- b. Kegiatan Pelantikan Tata Boga : Rp. 65.200.000,-
- c. Kegiatan Pelatihan Komputer : Rp. 70.120.000,-
- d. Kegiatan Sosialisasi Horticultural : Rp.25.315.000,-
- e. Kegiatan Sosialisasi Narkoba : Rp.14.426.000,-
- f. Kegiatan Sosialisasi Hukum : Rp.11.926.000,-
- g. Bantuan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama : Rp.2.200.000,-
- h. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat :
Rp.8.200.000,-
- i. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB :
Rp.15.500.000,-
- j. Peningkatan Kapasitas Kadar Pemberdayaan Masyarakat PPFM :
Rp.7.200.000,-

- k. Kegiatan Hari Besar HUT RI : Rp. 6.000.000,-
- l. Bantuan Santunan Lansia dan Anak Yatim : Rp. 16.500.000,-
- m. Bantuan Kostum Kelompok Nasid : Rp. 10.800.000,-
- n. Penyertaan Modal BUMDes Bersama : Rp. 200.000.000,-



DAFTAR WAWANCARA

“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Dilingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.”

Nama Narasumber : Romian Parulian Siagian S,STP, M.Si
Jabatan : Camat Teluk Mengkudu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari : Rabu
Tanggal : 5 Januari 2020
Tempat : Kantor Camat Teluk Mengkudu

1. Partisipasi masyarakat

- a. Bagaimana peran masyarakat teluk mengkudu dalam menyikapi peraturan daerah no 7 tahun 2016 bagian kedua tentang budaya membaca ?

Jawaban : peran masyarakat cukup rendah dalam mendukung peraturan daerah di sebab banyak faktor-faktor. Faktor lingkungan dan juga faktor ekonomi misalnya hal ini menyebabkan masyarakat memiliki partisipasi yang rendah dalam meningkatkan budaya membaca.

- b. Bagaimana peran orang tua untuk mendorong budaya membaca kepada anak-anak mereka?

Jawaban: peran orangtua dalam mendukung dan mengawasi anak untuk dapat meningkatkan kemampuan dengan membudayakan membaca sangat rendah. Hal ini juga di pengaruhi ekonomi yang mengharuskan para orangtua harus mencari rezeki untuk menafkahi keluarga. Maka terkadang mereka berpikir bisa makan aja sudah bersyukur. Sehingga pendidikan terkadang dianggap tidak penting.

- c. Apakah anak-anak khususnya di kecamatan teluk mengkudu memiliki motivasi untuk menumbuhkan budaya membaca?

Jawaban: untuk motivasi ada namun tidak begitu besar, hal ini juga diakibatkan lingkungan yang tidak memiliki persaingan dalam meningkatkan kemampuan. Yang terjadi anak-anak juga ikut mencari rezeki.

2. Sarana dan prasarana

- a. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di kecamatan teluk mengkudu untuk mendukung minat baca masyarakat?

Jawaban : sarana dan prasarana yang ada dikecamatan tidak ada. Tapi di desa-desa memiliki fasilitas dan sarana prasarana.

- b. Apakah perpustakaan desa sudah ada, dan berapa jumlah buku yang tersedia?

Jawaban : perpustakaan di beberapa desa sudah ada. Untuk jumlah buku yang tersedia juga relatif tergantung pada desa-desanya.

- c. Apakah perpustakaan daerah ikut serta mendukung dalam pengadaan buku-buku di kecamatan?

Jawaban : perpustakaan desa ikut membantu dengan menghadirkan perpustakaan keliling ke desa-desa sebulan sekali atau sebulan dua kali.

3. Peran pemerintah

- a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : peran pemerintah daerah belum begitu mempengaruhi minat baca di masyarakat. Memang saat ini pemerintah daerah lagi menjalankan budaya literasi. Namun untuk di kecamatan teluk mengkudu yang memiliki letak geografis pesisir dan pertanian. Begitu pula partisipasi yang rendah, sehingga budaya membaca itu belum dapat berjalan sesuai seperti diharapkan.

- b. Apakah ada peraturan bupati, kepala dinas atau camat untuk mengatur waktu belajar dalam menumbuhkan minat baca?

Jawaban : sampai saat ini untuk peraturan camat tidak ada, untuk peraturan bupati kita juga belum mengetahui lebih pasti.

- c. Bagaimana dukungan pemerintah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : pemerintah sangat mendukung sekali akan adanya budaya membaca. Apalagi dengan adanya penghargaan yang diberikan USAID kepada kabupaten Serdang Bedagai. Ini sebagai motivasi pemerintah untuk bisa menciptakan masyarakat Serdang Bedagai yang pintar.

4. Anggaran Pelaksanaan

- a. Adakah anggaran khusus yang disiapkan untuk menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk di kecamatan belum ada anggaran khusus yang disiapkan. Namun anggaran itu ada di desa. Hal ini dikarenakan desa memiliki Dana Desa yang bisa dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan melaksanakan budaya membaca.

- b. Apakah desa dapat menggunakan dana desa untuk menyediakan bahan bacaan dan guru agar dapat memotivasi tenaga pengajar dan masyarakat.

Jawaban : desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk penyediaan sarana dan prasarana melalui usulan di musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG).

5. Standar Operasional Prosedur

- a. Adakah Standar pelaksanaan dalam pelaksanaan program budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk standar operasional prosedur pelaksanaan budaya membaca belum ada.

- b. Apakah ada kelompok- kelompok belajar yang dibentuk untuk mendukung peraturan daerah tersebut?

Jawaban : kelompok- kelompok membaca sudah ada untuk mendukung pemerintah daerah. Walaupun masih belum memenuhi standar.

6. Faktor pendukung apa saja yang ada untuk mendukung budaya membaca?

Jawaban : 1. Motivasi

2. sarana dan prasarana

3. kemas (inovasi)

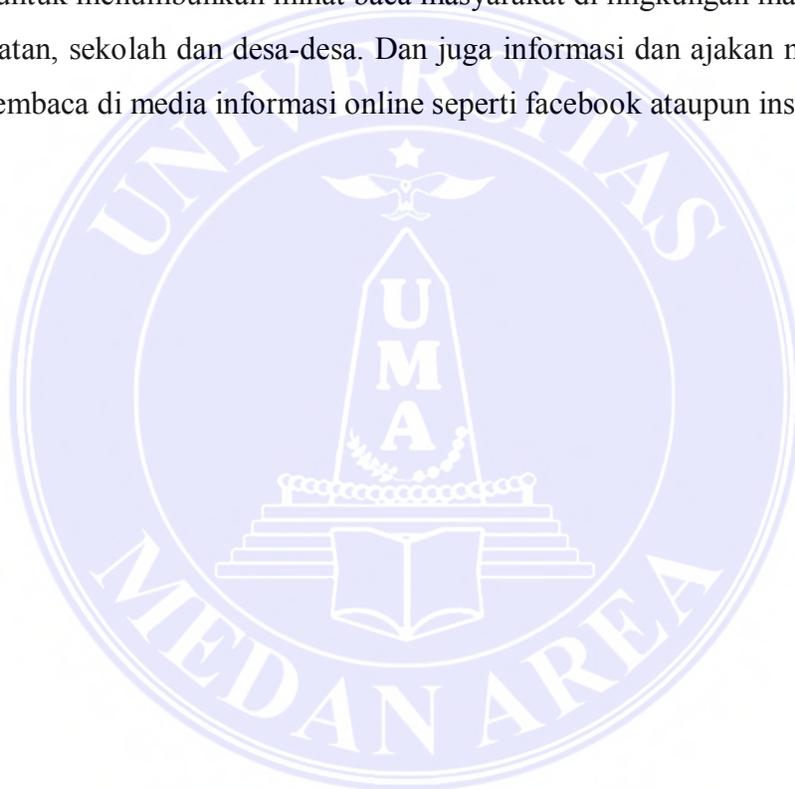
7. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam membudayakan membaca di lingkungan masyarakat?

Jawaban : 1. Kemajuan teknologi

2. Lingkungan

8. Bagaimana Penyampain Informasi mengenai Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat?

Jawaban : penyampaian informasi dan sosialisasi sudah di lakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi kepada camat dan kepala- kepala sekolah serta kepala desa, untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah No 7 tahun 2016. Melalui gerakan gemar membaca seperti yang di sampaikan oleh bapak Bupati Serdang Bedagai. Begitupula dengan sosialisai melalui media cetak dan media online. Seperti spanduk untuk menumbuhkan minat baca masyarakat di lingkungan masyarakat yang ada di kecamatan, sekolah dan desa-desa. Dan juga informasi dan ajakan melakukan budaya gemar membaca di media informasi online seperti facebook ataupun instagram.



DAFTAR WAWANCARA

“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Dilingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.”

Nama Narasumber : Drs. Joni Walker Damanik
Jabatan : kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari : senin
Tanggal : 18 januari 2020
Tempat : Hotel Grand Antares Medan

1. Partisipasi Masyarakat

- a) Peran masyarakat dalam meyakini peraturan daerah No 7 Tahun 2016 bagian kedua tentang budaya membaca
 - Kelompok – kelompok masyarakat agar menyediakan Taan Bacaan yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat
 - Mendorong terbentuknya Kelompok – Kelompok baca di masyarakat
- b) Peran orangtua mendorong budaya membaca kepada anak – anak mereka
 - Orangtua menyediakan buku bacaan di rumah dan membantu anaknya untuk membaca
 - Setiap orangtua untuk membacakan buku kepada anaknya di rumah
- c) Anak – anak memiliki motivasi untuk menumbuhkan budaya membaca, melalui gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang dilaksanakan di sekolah – sekolah khusus SD dan SMP Negeri /swasta di kabupaten serdang bedagai sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas masing – masing .Motifasi anak untuk membaca dan memahami isi bacaan terus di kembangkan melalui penjadwalan kegiatan Literasi sekolah (GLS) di sekolah yaitu hari selasa kegiatan membaca, kamis mendengar dan hari sabtu menulis.

2. Sarana dan prasarana

- a) Sarana dan prasarana yang tersedia di kecamatan teluk mengkudu untuk mendukung minat baca masyarakat

Khususnya untuk peserta didik di jenjang SD dan SMP, sekolah – sekolah di kecamatan teluk mengkudu pada umumnya sudah memiliki perpustakaan dengan berbagai kondisi di lengkapi dengan buku-buku koleksi perpustakaan baik buku fiksi maupun non fiksi disamping itu untuk mendukung perpustakaan juga disediakan pojok baca sudut baca ,gerobak di sekolah-sekolah untuk lebih mendekatkan buku baca kepeserta didik.

- b) Perpustakaan desa juga sudah tersedia di teluk mengkudu antara lain :

- Perpustakaan desa Liberi
- Perpustakaan pematang setrak
- Perpustakaan desa Pasar Baru
- Perpustakaan desa Matapao
- Perpustakaan desa Pematang Guntung
- Perpustakaan desa Sentang
- Perpustakaan desa Pekan Sialang Buah

- c) Perpustakaan juga ikut serta dalam mendukung dalam mengadakan buku-buku di kecamatan. Khusus untuk perpustakaan sekoah, dinas pendidikan kabupaten serdang Bedagai secara terus menerus mengadakan buku koleksi perputakaan baik di SD maupun SMP melalui Dana Alokasi Khusus fisik bidang pendidikan

3. Peran pemeritahan

- a. Peran pemerintahan daerah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat :
- MoU dengan USAID PRIORITAS dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di kabupaten serdang bedagai
 - Deklarasi budaya baca kabupaten serdang bedagai 28 november 2015 oleh (pj) bupati serdang bedagai, ketua DPRD dan unsur masyarakat serta unsur pelajar
 - Megeluarkan PERDA No 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan. Pada bagian kedua terkait budaya membaca di
- b. Perraturan daerah No 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan

- c. Dukong pemerintahaan dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat
 - Melalui gerakan Literasi sekolah yaitu pembiasaan membaca bagi peserta didik sejak usia pendidikan dasar
 - Mendorong Derdirinya Taman Bacaan Masyarakat melalui partisipasi masyarakat
 - Penyediaan buku-buku bacaan yang mudah diakses masyarakat melalui perpustakaan daerah, perpustakaan des dan perpustakaan keliling

4. Anggaran pelaksanaan

- a. Anggaran khusus yang disiapkan untuk menumbuhkan budaya membaca di masyarakat

Khususnya di sekolah-sekolah SD dan SMP, anggaran yang di gunakan untuk menubuhkan budaya membaca di kalangan peserta didik melalui Gerakan Literasi sekolah menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Terkait kegiatan pelatihan, pengembangan minat budaya baca bagi pendidik dianggarkan melalui APBD Dinas Pendidikan

- b. Dana Desa dapat digunakan untuk perpustakaan desa dan penyediaan buku baca. Dan tentunya para pendidik / guru turut serta dalam memotifasi masyarakat dalam melaksanakan budaya membaca di Kabupaten Serdang Bedagai

5. Standar Operasional Prosedur

- a. kelompok-kelompok belajar di bentuk untuk mendukung peraturan daerah terkait budaya membaca di masyarakat

- FORMALINDO :Forum Masyarakat Literasi Indonesi
- FORMALSU :Forum Masyarakat Literasi Sumatra Utara

6. Faktor Pendukng untuk mendukung budaya membaca di masyarakat

1. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur dan mendukung budaya membaca di masyarakat
2. Kegiatan Literasi baik yang di laksanakan oleh pemerintahan, swasta maupun masyarakat
3. Adanya perpusatkaan baik perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa Serta Taman Bacaan milik masyarakat dengan fasilitas yang memadai dan mudah diakses

4. Ketersediaan buku baca di perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat
7. Faktor penghambat dalam membudayaan membaca di lingkungan masyarakat
 1. Faktor Lingkungan , lingkungan yang baik dipengaruhi oleh orang-orang yang akan memberikan dorongan positif di setiap aspek kehidupannya.
 2. Perkembangan teknologi yang lebih mengedepankan hiburan menarik
 3. Harga buku yang relatif tidak terjangkau
 4. Perpustakaan belum menjadi tempat yang menarik untuk di kunjungi bagi peserta didik
 5. Orangtua yang terlalu sibuk dengan kegiatan tertentu

8. Bagaimana Penyampain Informasi mengenai Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat?

Jawaban : penyampaian informasi dan sosialisasi sudah di lakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi kepada camat dan kepala- kepala sekolah serta kepala desa, untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah No 7 tahun 2016. Melalui gerakan gemar membaca seperti yang di sampaikan oleh bapak Bupati Serdang Bedagai. Begitupula dengan sosialisai melalui media cetak dan media online. Seperti spanduk untuk menumbuhkan minat baca masyarakat di lingkungan masyarakat yang ada di kecamatan, sekolah dan desa-desa. Dan juga informasi dan ajakan melakukan budaya gemar membaca di media informasi online seperti facebook ataupun instagram.

DAFTAR WAWANCARA

“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Dilingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.”

Nama Narasumber : dr.Rizki Ramadan Hasibuan,MM.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari : Senin
Tanggal : 18 januari 2020
Tempat : Hotel Grand Antares

1. Partisipasi masyarakat

a. Bagaimana peran masyarakat teluk mengkudu dalam menyikapi peraturan daerah no 7 tahun 2016 bagian kedua tentang budaya membaca ?

Jawaban : peran masyarakat cukup rendah, masyarakat Teluk Mengkudu lebih mementingkan mencari nafkah dan bekerja daripada untuk membacca atau belajar. Maka dari itu peranan masyarakat cukup rendah dalam mendukung perturan daerah tersebut.

b. Bagaimana peran orang tua untuk mendorong budaya membaca kepada anak-anak mereka?

Jawaban: peran orangtua dalam mendukung dan mengawasi anak untuk dapat meningkatkan kemampuan dengan membudayakan membaca sangat rendah. Orang tua saat ini berpikir ketika dia sudah mensekolahkan anaknya maka tugasnya untuk mendidik sudah selesai. Bahkan ketika ada desa yang menyiapkan guru untuk belajar, merka juga tidak dapat menyempatkan diri untuk hadir, lebih memilih untuk ke waarung-warung kopi.

c. Apakah anak-anak, khususnya di kecamatan teluk mengkudu memiliki motivasi untuk menumbuhkan budaya membaca?

Jawaban: Motivasi di Kecamatan Teluk Mengkudu sangat rendah, hal ini terjadi karena anak-anak berpikir praktis. Bekerja dan mendapat upah. Hal ini membuat mereka lalai dalam belajar. Kalaupun ada kemauan anak-anak terkadang orangtua tidak mampu membiayai.

2. Sarana dan prasarana

a. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di kecamatan teluk mengkudu untuk mendukung minat baca masyarakat?

Jawaban : sarana dan prasarana yang ada saat ini masih cukup memprihatinkan. Seharusnya desa dapat menyediakan fasilitas membaca dengan pengalokasian dana desa yang dimiliki.

b. Apakah perpustakaan desa sudah ada, dan berapa jumlah buku yang tersedia?

Jawaban : perpustakaan di beberapa desa sudah ada tapi belum memenuhi standar. Dan ada juga desa-desa yang belum memiliki perpustakaan desa.

c. Apakah perpustakaan daerah ikut serta mendukung dalam pengadaan buku-buku di kecamatan?

Jawaban : perpustakaan daerah ikut membantu dengan menghadirkan perpustakaan keliling ke desa-desa sebulan sekali atau sebulan dua kali.

3. Peran pemerintah

a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : peran pemerintah daerah belum begitu mempengaruhi minat baca di masyarakat. Memang saat ini pemerintah daerah lagi menjalankan budaya literasi. Namun untuk di kecamatan teluk mengkudu yang memiliki letak geografis pesisir dan pertanian. Begitu pula partisipasi yang rendah, sehingga budaya membaca itu belum dapat berjalan sesuai seperti diharapkan.

b. Apakah ada peraturan bupati, kepala dinas atau camat untuk mengatur waktu belajar dalam menumbuhkan minat baca?

Jawaban : sampai saat ini untuk peraturan camat tidak ada. Peraturan bupati ada tapi saat ini juga kita belum melihat dampak dari peraturan itu sendiri. Kalau di

tingkat elit mungkin terlihat ataupun di sekolah-sekolah yang ada di pekotaan. Namun untuk di teluk mengkudu belum terlihat.

c. Bagaimana dukungan pemerintah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : pemerintah sangat mendukung sekali akan adanya budaya membaca. Apalagi dengan adanya penghargaan yang diberikan USAID kepada kabupaten Serdang Bedagai. Ini sebagai motivasi pemerintah untuk bisa menciptakan masyarakat Serdang Bedagai yan pintar. Lalumungkin nanti kita akan meminta kepala dinas pendidikan dan kepala dinas perpustakaan untuk lebih memperhatikan daerah-daerah pesisir.

4. Anggaran Pelaksanaan

a. Adakah anggaran khusus yang disiapkan untuk menumbuhkan budaya memaca di masyarakat?

Jawaban : untuk di kecamatan belum ada anggaran khusus yang disiapkan. Namun anggaran itu ada di desa. Hal ini dikarenakan desa memiliki Dana Desa yang bisa dialokasikan untukaa pemberdayaan masyarakat. Dengan melaksanakan budaya membaca.

b. Apakah desa dapat menggunakan dana desa untuk menyediakan bahan bacaan dan guru agar dapat memotivasi tenaga pengajar dan masyarakat.

Jawaban : desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk penyediaan sarana dan prasana melalui usulan di musywarah rencan pembangunan (MUSRENBANG).

5. Standar Operasional Posedur

a. Adakah Standar pelaksanaan dalam pelaksanaan program budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk standar operasional prosedur pelaksanaan budaya membaca belum ada.

b. Apakah ada kelompok- kelompok belajar yang di bentuk untuk mendukung peraturan daerah tersebut?

Jawaban : kelompok- kelompok membaca sudah ada untuk mendukung pemerintah daerah. Walaupun masih belum memnuhi standar.

6. Faktor pendukung apa saja yang ada untuk mendukung budaya membaca?

- Jawaban :
1. Sarana dan prasarana
 2. Peraturan yang tegas
 3. Motivasi
 4. Dukungan Orang tua
 5. Standar Operasional Prosedur.

7. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam membudayakan membaca di lingkungan masyarakat?

- Jawaban :
1. Lingkungan
 2. kemajuan teknologi
 3. Perekonomian
 4. Masyarakat yang berpikir apatis

8. Bagaimana Penyampain Informasi mengenai Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat?

Jawaban : penyampaian informasi dan sosialisasi sudah di lakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi kepada camat dan kepala- kepala sekolah serta kepala desa, untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah No 7 tahun 2016. Melalui gerakan gemar membaca seperti yang di sampaikan oleh bapak Bupati Serdang Bedagai. Begitupula dengan sosialisai melalui media cetak dan media online. Seperti spanduk untuk menumbuhkan minat baca masyarakat di lingkungan masyarakat yang ada di kecamatan, sekolah dan desa-desa. Dan juga informasi dan ajakan melakukan budaya gemar membaca di media informasi online seperti facebook ataupun instagram.

DAFTAR WAWANCARA

“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Dilingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.”

Nama Narasumber : Khaidir SE
Jabatan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari : Kamis
Tanggal : 6 Januari 2020
Tempat : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

1. Partisipasi masyarakat

a. Bagaimana peran masyarakat teluk mengkudu dalam menyikapi peraturan daerah no 7 tahun 2016 bagian kedua tentang budaya membaca ?

Jawaban : peran masyarakat cukup rendah, masyarakat Teluk Mengkudu lebih mementingkan mencari nafkah dan bekerja daripada untuk membacaa atau belajar. Maka dari itu peranan masyarakat cukup rendah dalam mendukung perturan daerah tersebut.

b. Bagaimana peran orang tua untuk mendorong budaya membaca kepada anak-anak mereka?

Jawaban: peran orangtua dalam mendukung dan mengawasi anak untuk dapat meningkatkan kemampuan dengan membudayakan membaca sangat rendah. Orang tua saat ini berpikir ketika dia sudah mensekolahkan anaknya maka tugasnya untuk mendidik sudah selesai. Bahkan ketika ada desa yang menyiapkan guru untuk belajar, merka juga tidak dapat menyempatkan diri untuk hadir, lebih memilih untuk ke waarung-warung kopi.

c. Apakah anak-anak, khususnya di kecamatan teluk mengkudu memiliki motivasi untuk menumbuhkan budaya membaca?

Jawaban: Motivasi di Kecamatan Teluk Mengkudu sangat rendah, hal ini terjadi karena anak-anak berpikir praktis. Bekerja dan mendapat upah. Hal ini membuat mereka lalai dalam belajar. Kalaupun ada kemauan anak-anak terkadang orangtua tidak mampu membiayai.

2. Sarana dan prasarana

a. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di kecamatan teluk mengkudu untuk mendukung minat baca masyarakat?

Jawaban : sarana dan prasarana yang ada saat ini masih cukup memprihatinkan. Seharusnya desa dapat menyediakan fasilitas membaca dengan pengalokasian dana desa yang dimiliki.

b. Apakah perpustakaan desa sudah ada, dan berapa jumlah buku yang tersedia?

Jawaban : perpustakaan di beberapa desa sudah ada tapi belum memenuhi standar. Dan ada juga desa-desa yang belum memiliki perpustakaan desa.

c. Apakah perpustakaan daerah ikut serta mendukung dalam pengadaan buku-buku di kecamatan?

Jawaban : perpustakaan daerah ikut membantu dengan menghadirkan perpustakaan keliling ke desa-desa sebulan sekali atau sebulan dua kali.

3. Peran pemerintah

a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : peran pemerintah daerah belum begitu mempengaruhi minat baca di masyarakat. Memang saat ini pemerintah daerah lagi menjalankan budaya literasi. Namun untuk di kecamatan teluk mengkudu yang memiliki letak geografis pesisir dan pertanian. Begitu pula partisipasi yang rendah, sehingga budaya membaca itu belum dapat berjalan sesuai seperti diharapkan.

b. Apakah ada peraturan bupati, kepala dinas atau camat untuk mengatur waktu belajar dalam menumbuhkan minat baca?

Jawaban : sampai saat ini untuk peraturan camat tidak ada. Peraturan bupati ada tapi saat ini juga kita belum melihat dampak dari peraturan itu sendiri. Kalau di

tingkat elit mungkin terlihat ataupun di sekolah-sekolah yang ada di pekotaan. Namun untuk di teluk mengkudu belum terlihat.

c. Bagaimana dukungan pemerintah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : pemerintah sangat mendukung sekali akan adanya budaya membaca. Apalagi dengan adanya penghargaan yang diberikan USAID kepada kabupaten Serdang Bedagai. Ini sebagai motivasi pemerintah untuk bisa menciptakan masyarakat Serdang Bedagai yan pintar. Lalumungkin nanti kita akan meminta kepala dinas pendidikan dan kepala dinas perpustakaan untuk lebih memperhatikan daerah-daerah pesisir.

4. Anggaran Pelaksanaan

a. Adakah anggaran khusus yang disiapkan untuk menumbuhkan budaya memaca di masyarakat?

Jawaban : untuk di kecamatan belum ada anggaran khusus yang disiapkan. Namun anggaran itu ada di desa. Hal ini dikarenakan desa memiliki Dana Desa yang bisa dialokasikan untukaa pemberdayaan masyarakat. Dengan melaksanakan budaya membaca.

b. Apakah desa dapat menggunakan dana desa untuk menyediakan bahan bacaan dan guru agar dapat memotivasi tenaga pengajar dan masyarakat.

Jawaban : desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk penyediaan sarana dan prasana melalui usulan di musywarah rencan pembangunan (MUSRENBANG).

5. Standar Operasional Posedur

a. Adakah Standar pelaksanaan dalam pelaksanaan program budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk standar operasional prosedur pelaksanaan budaya membaca belum ada.

b. Apakah ada kelompok- kelompok belajar yang di bentuk untuk mendukung peraturan daerah tersebut?

Jawaban : kelompok- kelompok membaca sudah ada untuk mendukung pemerintah daerah. Walaupun masih belum memnuhi standar.

6. Faktor pendukung apa saja yang ada untuk mendukung budaya membaca?

- Jawaban :
1. Sarana dan prasarana
 2. Peraturan yang tegas
 3. Motivasi
 4. Dukungan Orang tua
 5. Standar Operasional Prosedur.

7. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam membudayakan membaca di lingkungan masyarakat?

- Jawaban :
1. Lingkungan
 2. kemajuan teknologi
 3. Perekonomian
 4. Masyarakat yang berpikir apatis

8. Bagaimana Penyampain Informasi mengenai Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat?

Jawaban : penyampaian informasi dan sosialisasi sudah di lakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi kepada camat dan kepala- kepala sekolah serta kepala desa, untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah No 7 tahun 2016.

Melalui gerakan gemar membaca seperti yang di sampaikan oleh bapak Bupati Serdang Bedagai. Begitupula dengan sosialisai melalui media cetak dan media online. Seperti spanduk untuk menumbuhkan minat baca masyarakat di lingkungan masyarakat yang ada di kecamatan, sekolah dan desa-desa. Dan juga informasi dan ajakan melakukan budaya gemar membaca di media informasi online seperti facebook ataupun instagram. Namun partisipasi masyarakat untuk membudayakan membaca masih sangat rendah.

DAFTAR WAWANCARA

“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Dilingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.”

Nama Narasumber : Salimuddin
Jabatan : Kepala Desa Sentang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari : Kamis
Tanggal : 6 januari 2020
Tempat : Kantor Desa Sentang

1. Partisipasi masyarakat

a. Bagaimana peran masyarakat teluk mengkudu dalam menyikapi peraturan daerah no 7 tahun 2016 bagian kedua tentang budaya membaca ?

Jawaban : peran masyarakat cukup rendah, masyarakat di Desa Sentang lebih memilih bekerja daripada membaca. Kalau anak- anak sekolah juga ketika pulang dari sekolah mereka sebagian mencari uang dengan mencari hewan laut.

b. Bagaimana peran orang tua untuk mendorong budaya membaca kepada anak-anak mereka?

Jawaban: peran orangtua dalam mendukung dan mengawasi anak untuk dapat meningkatkan kemampuan dengan membudayakan membaca sangat rendah. Orang tua saat ini berpikir ketika dia sudah mensekolahkan anaknya maka tugasnya untuk mendidik sudah selesai. Bahkan ketika ada desa yang menyiapkan guru untuk belajar, merka juga tidak dapat menyempatkan diri untuk hadir, lebih memilih untuk ke warung-warung kopi.

c. Apakah anak-anak, khususnya di Desa Sentang memiliki motivasi untuk menumbuhkan budaya membaca?

Jawaban: Motivasi di Desa Sentang sangat rendah, hal ini terjadi karena mereka lebih memilih bekerja dan mendapat upah. Hal ini membuat mereka lalai dalam

belajar. Kalaupun ada kemauan anak-anak terkadang orangtua tidak mampu membiayai.

2. Sarana dan prasarana

a. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Sentang untuk mendukung minat baca masyarakat?

Jawaban : sarana dan prasarana yang ada saat ini masih cukup memperhatikan.

Adapun yang ada saat ini di Desa adalah perpustakaan mini

b. Apakah perpustakaan desa sudah ada, dan berapa jumlah buku yang tersedia?

Jawaban : perpustakaan yang ada di desa berkisar 100 buah buku.

c. Apakah perpustakaan daerah ikut serta mendukung dalam pengadaan buku-buku di kecamatan?

Jawaban : perpusatakaan daerah ikut membantu dengan menghadirkan perpustakaan keliling sesekali.

3. Peran pemerintah

a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : peran pemerintah daerah belum begitu mempengaruhi minat baca di masyarakat. Memang saat ini pemerintah daerah lagi menjalankan program Literasi, namun di Desa Sentang masih minim dukungan. Sehingga budaya membaca itu belum dapat berjalan sesuai seperti diharapkan.

b. Apakah ada peraturan bupati, kepala dinas atau camat untuk mengatur waktu belajar dalam menumbuhkan minat baca?

Jawaban : sampai saat ini untuk perturan camat tidak ada. Peraturan bupati ada tapi saat ini juga kita belum melihat dampak dari peraturan itu sendiri. Kalau di tingkat elit mungkin terlihat ataupun di sekolah-sekolah yang ada di pekotaan. Namun untuk di Desa Sentang belum terlihat.

c. Bagaimana dukungan pemerintah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk dukungan ada tapi ya begitu-begitu saja.

4. Anggaran Pelaksanaan

a. Adakah anggaran khusus yang disiapkan untuk menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk di Desa Sentang belum ada anggaran khusus yang disiapkan. Hal ini dikarenakan di dalam (MUSRENBANG). Masyarakat lebih memprioritaskan untuk pembangunan fisik yang ada di desa.

b. Apakah desa dapat menggunakan dana desa untuk menyediakan bahan bacaan dan guru agar dapat memotivasi tenaga pengajar dan masyarakat.

Jawaban : desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk penyediaan sarana dan prasana melalui usulan di musyawarah rencan pembangunan (MUSRENBANG). Tapi masyarakat belum menganggap itu hal yang penting.

5. Standar Operasional Posedur

a. Adakah Standar pelaksanaan dalam pelaksanaan program budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk standar operasional prosedur pelaksanaan budaya membaca belum ada.

b. Apakah ada kelompok- kelompok belajar yang di bentuk untuk mendukung peraturan daerah tersebut?

Jawaban : kelompok- kelompok membaca sudah ada untuk mendukung pemerintah daerah. Walaupun masih belum memnuhi standar.

6. Faktor pendukung apa saja yang ada untuk mendukung budaya membaca?

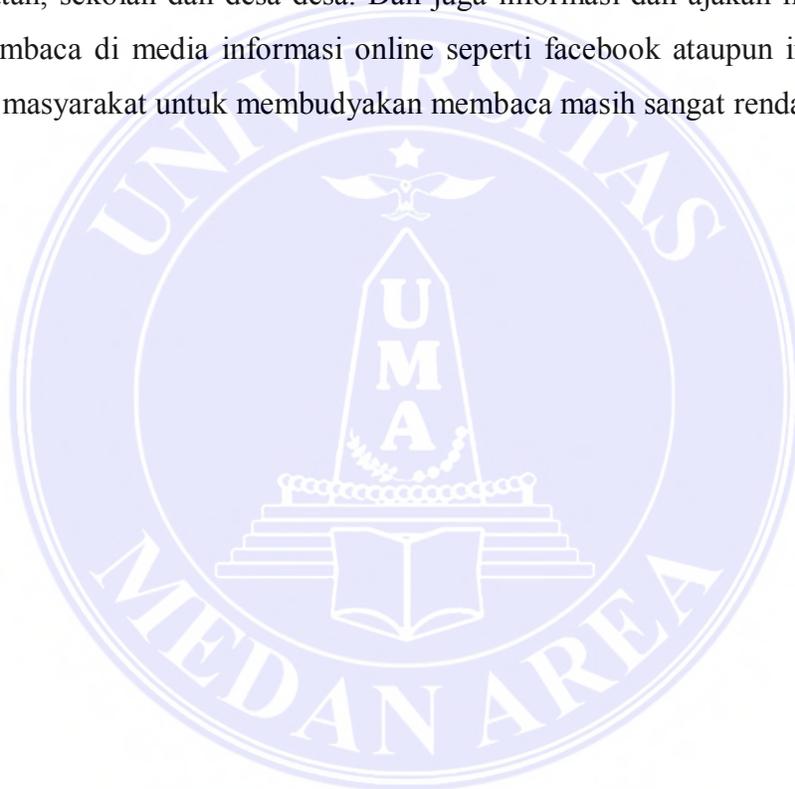
- Jawaban :
1. Sarana dan prasarana
 2. Peraturan yang tegas
 3. Motivasi
 4. Dukungan Orang tua

7. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam membudayakan membaca di lingkungan masyarakat?

- Jawaban :
1. Lingkungan
 2. kemajuan tekhnologi
 3. Perekonomian

8. Bagaimana Penyampain Informasi mengenai Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat?

Jawaban : penyampaian informasi dan sosialisasi sudah di lakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi kepada camat dan kepala- kepala sekolah serta kepala desa, untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah No 7 tahun 2016. Melalui gerakan gemar membaca seperti yang di sampaikan oleh bapak Bupati Serdang Bedagai. Begitupula dengan sosialisai melalui media cetak dan media online. Seperti spanduk untuk menumbuhkan minat baca masyarakat di lingkungan masyarakat yang ada di kecamatan, sekolah dan desa-desa. Dan juga informasi dan ajakan melakukan budaya gemar membaca di media informasi online seperti facebook ataupun instagram. Namun partisipasi masyarakat untuk membudayakan membaca masih sangat rendah.



DAFTAR WAWANCARA

“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Dilingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.”

Nama Narasumber : Syahrurn
Jabatan : Kepala Desa Bogak Besar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari : Kamis
Tanggal : 6 januari 2020
Tempat : Kantor Desa Bogak Besar

1. Partisipasi masyarakat

a. Bagaimana peran masyarakat teluk mengkudu dalam menyikapi peraturan daerah no 7 tahun 2016 bagian kedua tentang budaya membaca ?

Jawaban : peran masyarakat cukup rendah, masyarakat di Desa Bogak Besar lebih memilih bekerja daripada membaca. Kalau anak- anak sekolah juga ketika pulang dari sekolah mereka sebagian mencari uang dengan mencari hewan laut.

b. Bagaimana peran orang tua untuk mendorong budaya membaca kepada anak-anak mereka?

Jawaban: peran orangtua dalam mendukung dan mengawasi anak untuk dapat meningkatkan kemampuan dengan membudayakan membaca sangat rendah. Orang tua saat ini berpikir ketika dia sudah mensekolahkan anaknya maka tugasnya untuk mendidik sudah selesai. Bahkan ketika ada desa yang menyiapkan guru untuk belajar, merka juga tidak dapat menyempatkan diri untuk hadir, lebih memilih untuk ke warung-warung kopi.

c. Apakah anak-anak, khususnya di Desa Bogak Besar memiliki motivasi untuk menumbuhkan budaya membaca?

Jawaban: Motivasi di Desa Bogak Besar sangat rendah, hal ini terjadi karena mereka lebih memilih bekerja dan mendapat upah. Hal ini membuat mereka lalai

dalam belajar. Kalaupun ada kemauan anak-anak terkadang orantua tidak mampu membiayai.

2. Sarana dan prasarana

a. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Bogak Besar untuk mendukung minat baca masyarakat?

Jawaban : sarana dan prasarana yang ada saat ini masih cukup memperhatikan.

Adapun yang ada saat ini di Desa Bogak Besar belum Memiliki Perpustakaan.

b. Apakah perpustakaan desa sudah ada, dan berapa jumlah buku yang tersedia?

Jawaban : Dulu ada bukunya Tapi sekarang sudah berhilangan

c. Apakah perpustakaan daerah ikut serta mendukung dalam pengadaan buku-buku di kecamatan?

Jawaban : perpusatakaan daerah ikut membantu dengan menghadirkan perpustakaan keliling sesekali.

3. Peran pemerintah

a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : peran pemerintah daerah belum begitu mempengaruhi minat baca di masyarakat. Memang saat ini pemerintah daerah lagi menjalankan program Literasi, namun di Desa Bogak Besar masih minim dukungan. Sehingga budaya membaca itu belum dapat berjalan sesuai seperti diharapkan.

b. Apakah ada peraturan bupati, kepala dinas atau camat untuk mengatur waktu belajar dalam menumbuhkan minat baca?

Jawaban : sampai saat ini untuk perturan camat tidak ada. Peraturan bupati ada tapi saat ini juga kita belum melihat dampak dari peraturan itu sendiri. Kalau di tingkat elit mungkin terlihat ataupun di sekolah-sekolah yang ada di pekotaan. Namun untuk di Desa Sentang belum terlihat.

c. Bagaimana dukungan pemerintah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk dukungan ada tapi ya begitu-begitu saja.

4. Anggaran Pelaksanaan

a. Adakah anggaran khusus yang disiapkan untuk menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk di Desa Sentang belum ada anggaran khusus yang disiapkan. Hal ini dikarenakan di dalam (MUSRENBANG). Masyarakat lebih memprioritaskan untuk pembangunan fisik yang ada di desa.

b. Apakah desa dapat menggunakan dana desa untuk menyediakan bahan bacaan dan guru agar dapat memotivasi tenaga pengajar dan masyarakat.

Jawaban : desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk penyediaan sarana dan prasana melalui usulan di musyawarah rencan pembangunan (MUSRENBANG). Tapi masyarakat belum menganggap itu hal yang penting.

5. Standar Operasional Posedur

a. Adakah Standar pelaksanaan dalam pelaksanaan program budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk standar operasional prosedur pelaksanaan budaya membaca belum ada.

b. Apakah ada kelompok- kelompok belajar yang di bentuk untuk mendukung peraturan daerah tersebut?

Jawaban : kelompok- kelompok membaca sudah ada untuk mendukung pemerintah daerah. Walaupun masih belum memnuhi standar.

6. Faktor pendukung apa saja yang ada untuk mendukung budaya membaca?

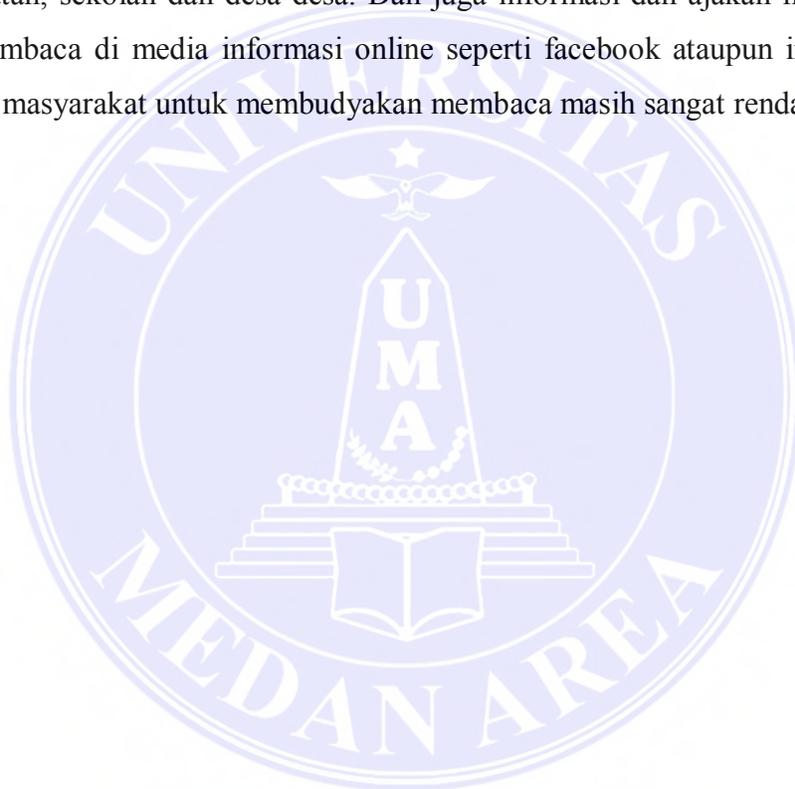
- Jawaban :
1. Sarana dan prasarana
 2. Peraturan yang tegas
 3. Motivasi
 4. Dukungan Orang tua

7. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam membudayakan membaca di lingkungan masyarakat?

- Jawaban :
1. Lingkungan
 2. kemajuan tekhnologi
 3. Perekonomian

8. Bagaimana Penyampain Informasi mengenai Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat?

Jawaban : penyampaian informasi dan sosialisasi sudah di lakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi kepada camat dan kepala- kepala sekolah serta kepala desa, untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah No 7 tahun 2016. Melalui gerakan gemar membaca seperti yang di sampaikan oleh bapak Bupati Serdang Bedagai. Begitupula dengan sosialisai melalui media cetak dan media online. Seperti spanduk untuk menumbuhkan minat baca masyarakat di lingkungan masyarakat yang ada di kecamatan, sekolah dan desa-desa. Dan juga informasi dan ajakan melakukan budaya gemar membaca di media informasi online seperti facebook ataupun instagram. Namun partisipasi masyarakat untuk membudayakan membaca masih sangat rendah.



DAFTAR WAWANCARA

“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Dilingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.”

Nama Narasumber : Ramlan
Jabatan : Kepala Desa Pematang Kuala
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari : Kamis
Tanggal : 6 januari 2020
Tempat : Kantor Desa Pematang Kuala

1. Partisipasi masyarakat

a. Bagaimana peran masyarakat teluk mengkudu dalam menyikapi peraturan daerah no 7 tahun 2016 bagian kedua tentang budaya membaca ?

Jawaban : peran masyarakat cukup rendah, masyarakat di Desa Pematang Kuala lebih memilih bekerja daripada membaca. Kalau anak- anak sekolah juga ketika pulang dari sekolah mereka sebagian mencari uang dengan mencari hewan laut.

b. Bagaimana peran orang tua untuk mendorong budaya membaca kepada anak-anak mereka?

Jawaban: peran orangtua dalam mendukung dan mengawasi anak untuk dapat meningkatkan kemampuan dengan membudayakan membaca sangat rendah. Orang tua saat ini berpikir ketika dia sudah mensekolahkan anaknya maka tugasnya untuk mendidik sudah selesai. Bahkan ketika ada desa yang menyiapkan guru untuk belajar, merka juga tidak dapat menyempatkan diri untuk hadir, lebih memilih untuk ke warung-warung kopi.

c. Apakah anak-anak, khususnya di Desa Sentang memiliki motivasi untuk menumbuhkan budaya membaca?

Jawaban: Motivasi di Desa Pematang Kuala sangat rendah, hal ini terjadi karena mereka lebih memilih bekerja dan mendapat upah. Hal ini membuat mereka lalai

dalam belajar. Kalaupun ada kemauan anak-anak terkadang orantua tidak mampu membiayai.

2. Sarana dan prasarana

a. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Pematang Kuala untuk mendukung minat baca masyarakat?

Jawaban : sarana dan prasarana yang ada saat ini masih cukup memperhatikan.

Adapun yang ada saat ini di Desa adalah perpustakaan mini

b. Apakah perpustakaan desa sudah ada, dan berapa jumlah buku yang tersedia?

Jawaban : perpustakaan yang ada di desa berkisar 200 buah buku.

c. Apakah perpustakaan daerah ikut serta mendukung dalam pengadaan buku-buku di kecamatan?

Jawaban : perpusatakaan daerah ikut membantu dengan menghadirkan perpustakaan keliling sesekali.

3. Peran pemerintah

a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : peran pemerintah daerah belum begitu mempengaruhi minat baca di masyarakat. Memang saat ini pemerintah daerah lagi menjalankan program Literasi, namun di Desa Pematang Kuala masih minim dukungan. Sehingga budaya membaca itu belum dapat berjalan sesuai seperti diharapkan.

b. Apakah ada peraturan bupati, kepala dinas atau camat untuk mengatur waktu belajar dalam menumbuhkan minat baca?

Jawaban : sampai saat ini untuk perturan camat tidak ada. Peraturan bupati ada tapi saat ini juga kita belum melihat dampak dari peraturan itu sendiri. Kalau di tingkat elit mungkin terlihat ataupun di sekolah-sekolah yang ada di pekotaan. Namun untuk di Desa Pematang Kuala belum terlihat.

c. Bagaimana dukungan pemerintah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk dukungan ada bantuan buku-buku bacaan di Desa Pematang Kuala.

4. Anggaran Pelaksanaan

a. Adakah anggaran khusus yang disiapkan untuk menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk di Desa Pematang Kuala belum ada anggaran khusus yang disiapkan. Hal ini dikarenakan di dalam (MUSRENBANG). Masyarakat lebih memprioritaskan untuk pembangunan fisik yang ada di desa.

b. Apakah desa dapat menggunakan dana desa untuk menyediakan bahan bacaan dan guru agar dapat memotivasi tenaga pengajar dan masyarakat.

Jawaban : desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk penyediaan sarana dan prasana melalui usulan di musywarah rencana pembangunan (MUSRENBANG). Tapi masyarakat belum menganggap itu hal yang penting.

5. Standar Operasional Posedur

a. Adakah Standar pelaksanaan dalam pelaksanaan program budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk standar operasional prosedur pelaksanaan budaya membaca belum ada.

b. Apakah ada kelompok- kelompok belajar yang di bentuk untuk mendukung peraturan daerah tersebut?

Jawaban : kelompok- kelompok membaca sudah ada untuk mendukung pemerintah daerah. Walaupun masih belum memnuhi standar.

6. Faktor pendukung apa saja yang ada untuk mendukung budaya membaca?

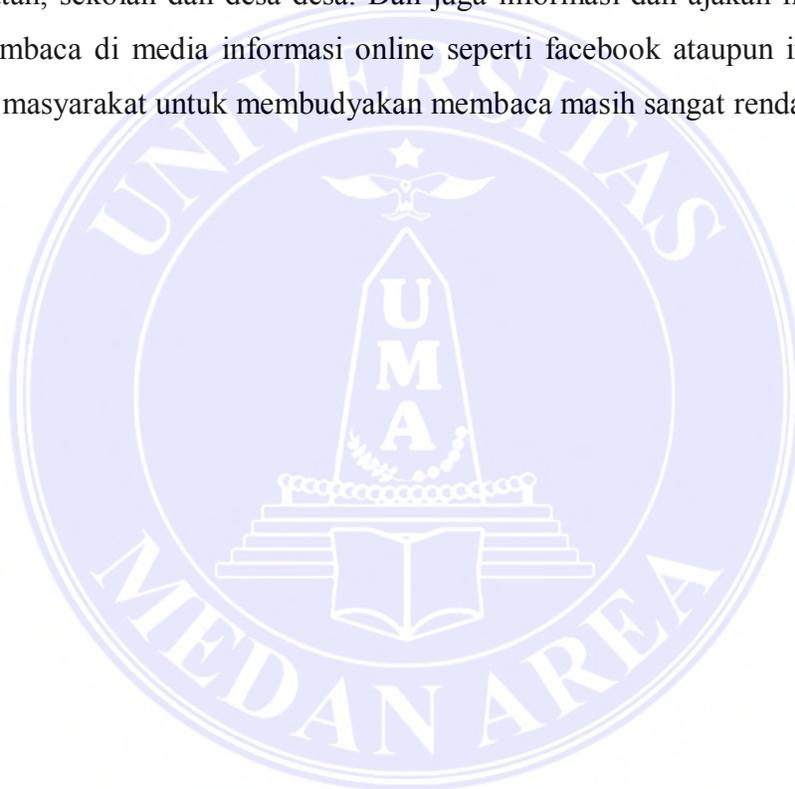
- Jawaban :
1. Sarana dan prasarana
 2. Peraturan yang tegas
 4. Dukungan Orang tua

7. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam membudayakan membaca di lingkungan masyarakat?

- Jawaban :
1. Lingkungan
 2. kemajuan teknologi
 3. Perekonomian

8. Bagaimana Penyampain Informasi mengenai Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat?

Jawaban : penyampaian informasi dan sosialisasi sudah di lakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi kepada camat dan kepala- kepala sekolah serta kepala desa, untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah No 7 tahun 2016. Melalui gerakan gemar membaca seperti yang di sampaikan oleh bapak Bupati Serdang Bedagai. Begitupula dengan sosialisai melalui media cetak dan media online. Seperti spanduk untuk menumbuhkan minat baca masyarakat di lingkungan masyarakat yang ada di kecamatan, sekolah dan desa-desa. Dan juga informasi dan ajakan melakukan budaya gemar membaca di media informasi online seperti facebook ataupun instagram. Namun partisipasi masyarakat untuk membudayakan membaca masih sangat rendah.



DAFTAR WAWANCARA

“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Dilingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.”

Nama Narasumber : suriadi
Jabatan : Kepala Desa Pasar Baru
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari : Kamis
Tanggal : 6 januari 2020
Tempat : Kantor Desa Pasar Baru

1. Partisipasi masyarakat

a. Bagaimana peran masyarakat teluk mengkudu dalam menyikapi peraturan daerah no 7 tahun 2016 bagian kedua tentang budaya membaca ?

Jawaban : peran masyarakat cukup rendah, masyarakat di Desa Pasar Baru lebih memilih bekerja daripada membaca. Kalau anak- anak sekolah juga ketika pulang dari sekolah mereka sebagian mencari uang untuk jajan.

b. Bagaimana peran orang tua untuk mendorong budaya membaca kepada anak-anak mereka?

Jawaban: peran orangtua dalam mendukung dan mengawasi anak untuk dapat meningkatkan kemampuan dengan membudayakan membaca sangat rendah. Orang tua saat ini berpikir ketika dia sudah mensekolahkan anaknya maka tugasnya untuk mendidik sudah selesai. Bahkan ketika ada desa yang menyiapkan guru untuk belajar, merka juga tidak dapat menyempatkan diri untuk hadir, lebih memilih untuk ke warung-warung kopi.

c. Apakah anak-anak, khususnya di Desa Paasar Baru memiliki motivasi untuk menumbuhkan budaya membaca?

Jawaban: Motivasi di Desa Pasar Baru sangat rendah, hal ini terjadi karena mereka lebih memilih bekerja dan mendapat upah. Hal ini membuat mereka lalai

dalam belajar. Kalaupun ada kemauan anak-anak terkadang orangtua tidak mampu membiayai.

2. Sarana dan prasarana

a. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Pasar Baru untuk mendukung minat baca masyarakat?

Jawaban : sarana dan prasarana yang ada saat ini masih cukup memperhatikan.

Adapun yang ada saat ini di Desa adalah perpustakaan mini

b. Apakah perpustakaan desa sudah ada, dan berapa jumlah buku yang tersedia?

Jawaban : perpustakaan yang ada di desa berkisar 150 buah buku.

c. Apakah perpustakaan daerah ikut serta mendukung dalam pengadaan buku-buku di kecamatan?

Jawaban : perpusatakaan daerah ikut membantu dengan menghadirkan perpustakaan keliling sesekali.

3. Peran pemerintah

a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : peran pemerintah daerah belum begitu mempengaruhi minat baca di masyarakat. Memang saat ini pemerintah daerah lagi menjalankan program Literasi, namun di Desa Pasar Baru masih minim dukungan. Sehingga budaya membaca itu belum dapat berjalan sesuai seperti diharapkan.

b. Apakah ada peraturan bupati, kepala dinas atau camat untuk mengatur waktu belajar dalam menumbuhkan minat baca?

Jawaban : sampai saat ini untuk perturan camat tidak ada. Peraturan bupati ada tapi saat ini juga kita belum melihat dampak dari peraturan itu sendiri. Kalau di tingkat elit mungkin terlihat ataupun di sekolah-sekolah yang ada di pekotaan. Namun untuk di Desa Pasar Baru belum terlihat.

c. Bagaimana dukungan pemerintah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk dukungan ada tapi ya begitu-begitu saja.

4. Anggaran Pelaksanaan

a. Adakah anggaran khusus yang disiapkan untuk menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk di Desa Pasar Baru belum ada anggaran khusus yang disiapkan. Hal ini dikarenakan di dalam (MUSRENBANG). Masyarakat lebih memprioritaskan untuk pembangunan fisik yang ada di desa.

b. Apakah desa dapat menggunakan dana desa untuk menyediakan bahan bacaan dan guru agar dapat memotivasi tenaga pengajar dan masyarakat.

Jawaban : desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk penyediaan sarana dan prasana melalui usulan di musyawarah rencan pembangunan (MUSRENBANG). Tapi masyarakat belum menganggap itu hal yang penting.

5. Standar Operasional Posedur

a. Adakah Standar pelaksanaan dalam pelaksanaan program budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk standar operasional prosedur pelaksanaan budaya membaca belum ada.

b. Apakah ada kelompok- kelompok belajar yang di bentuk untuk mendukung peraturan daerah tersebut?

Jawaban : kelompok- kelompok membaca sudah ada untuk mendukung pemerintah daerah. Walaupun masih belum memnuhi standar.

6. Faktor pendukung apa saja yang ada untuk mendukung budaya membaca?

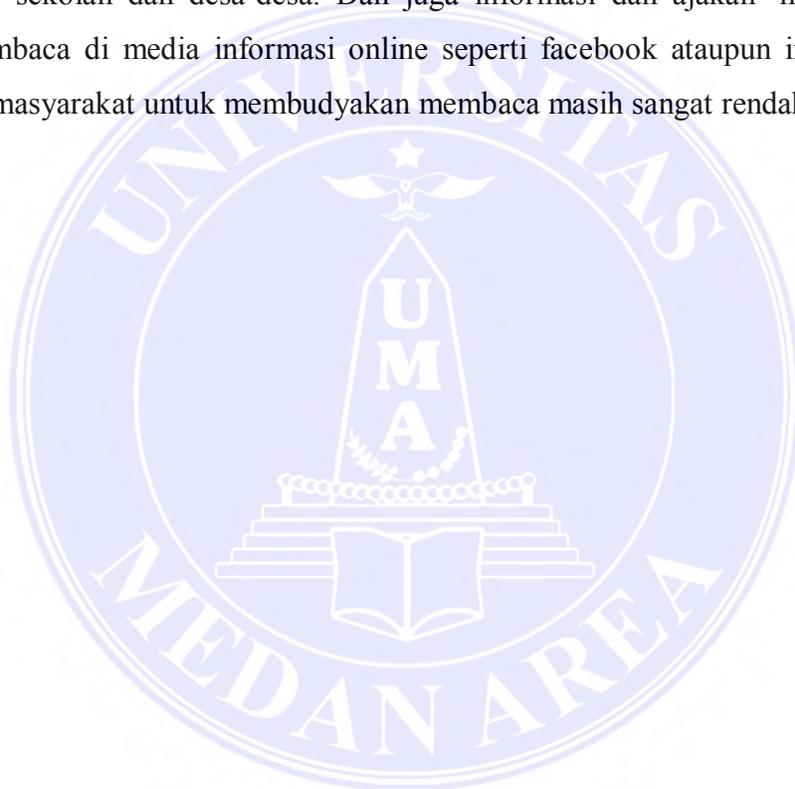
- Jawaban :
1. Sarana dan prasarana
 2. Peraturan yang tegas
 3. Motivasi
 4. Dukungan Orang tua

7. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam membudayakan membaca di lingkungan masyarakat?

- Jawaban :
1. Lingkungan
 2. kemajuan tekhnologi
 3. Perekonomian

8. Bagaimana Penyampain Informasi mengenai Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat?

Jawaban : penyampaian informasi dan sosialisasi sudah di lakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi kepada camat dan kepala- kepala sekolah serta kepala desa, untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah No 7 tahun 2016. Melalui gerakan gemar membaca seperti yang di sampaikan oleh bapak Bupati Serdang Bedagai. Begitupula dengan sosialaisai melalui media cetak dan media online. Seperti spanduk untuk menumbuhkan minat baca masyarakat di lingkungan masyarakat yang ada di kecamatan, sekolah dan desa-desa. Dan juga informasi dan ajakan melakukan budaya gemar membaca di media informasi online seperti facebook ataupun instagram. Namun partisipasi masyarakat untuk membudayakan membaca masih sangat rendah.



DAFTAR WAWANCARA

‘Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Dilingkungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Literasi Di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.’

Nama Narasumber : Syahrial
Jabatan : Kepala Desa Pekan Sialang Buah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Hari : Kamis
Tanggal : 6 januari 2020
Tempat : Kantor Desa Pekan Sialang Buah

1. Partisipasi masyarakat

a. Bagaimana peran masyarakat teluk mengkudu dalam menyikapi peraturan daerah no 7 tahun 2016 bagian kedua tentang budaya membaca ?

Jawaban : peran masyarakat cukup rendah, masyarakat di Desa Pekan Sialang Buah lebih memilih bekerja daripada membaca. Kalau anak- anak sekolah juga ketika pulang dari sekolah mereka sebagian mencari uang untuk jajan.

b. Bagaimana peran orang tua untuk mendorong budaya membaca kepada anak-anak mereka?

Jawaban: peran orangtua dalam mendukung dan mengawasi anak untuk dapat meningkatkan kemampuan dengan membudayakan membaca sangat rendah. Orang tua saat ini berpikir ketika dia sudah mensekolahkan anaknya maka tugasnya untuk mendidik sudah selesai. Bahkan ketika ada desa yang menyiapkan guru untuk belajar, merka juga tidak dapat menyempatkan diri untuk hadir, lebih memilih untuk ke waarung-warung kopi.

c. Apakah anak-anak, khususnya di Desa Pekan Sialang Buah memiliki motivasi untuk menumbuhkan budaya membaca?

Jawaban: Motivasi di Desa Pekan Sialang Buah sangat rendah, hal ini terjadi karena mereka lebih memilih bekerja dan mendapat upah. Hal ini membuat

mereka lalai dalam belajar. Kalaupun ada kemauan anak-anak terkadang orangtua tidak mampu membiayai.

2. Sarana dan prasarana

a. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Pekan Sialang Buah untuk mendukung minat baca masyarakat?

Jawaban : sarana dan prasarana yang ada saat ini masih cukup memprihatinkan.

Adapun yang ada saat ini di Desa tidak memiliki perpustakaan.

b. Apakah perpustakaan desa sudah ada, dan berapa jumlah buku yang tersedia?

Jawaban : dulu ada sekarang sudah berhilang semua.

c. Apakah perpustakaan daerah ikut serta mendukung dalam pengadaan buku-buku di kecamatan?

Jawaban : perpusatakaan daerah ikut membantu dengan menghadirkan perpustakaan keliling sesekali.

3. Peran pemerintah

a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : peran pemerintah daerah belum begitu mempengaruhi minat baca di masyarakat. Memang saat ini pemerintah daerah lagi menjalankan program Literasi, namun di Desa Pekan Sialang Buah masih minim dukungan. Sehingga budaya membaca itu belum dapat berjalan sesuai seperti diharapkan.

b. Apakah ada peraturan bupati, kepala dinas atau camat untuk mengatur waktu belajar dalam menumbuhkan minat baca?

Jawaban : sampai saat ini untuk peraturan camat tidak ada. Peraturan bupati ada tapi saat ini juga kita belum melihat dampak dari peraturan itu sendiri. Kalau di tingkat elit mungkin terlihat ataupun di sekolah-sekolah yang ada di pekotaan. Namun untuk di Desa Pekan Sialang Buah belum terlihat.

c. Bagaimana dukungan pemerintah dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk dukungan ada tapi ya begitu-begitu saja.

4. Anggaran Pelaksanaan

a. Adakah anggaran khusus yang disiapkan untuk menumbuhkan budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk di Desa Pekan Sialang Buah belum ada anggaran khusus yang disiapkan. Hal ini dikarenakan di dalam (MUSRENBANG). Masyarakat lebih memprioritaskan untuk pembangunan fisik yang ada di desa.

b. Apakah desa dapat menggunakan dana desa untuk menyediakan bahan bacaan dan guru agar dapat memotivasi tenaga pengajar dan masyarakat.

Jawaban : desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk penyediaan sarana dan prasana melalui usulan di musywarah rencan pembangunan (MUSRENBANG). Tapi masyarakat belum menganggap itu hal yang penting.

5. Standar Operasional Posedur

a. Adakah Standar pelaksanaan dalam pelaksanaan program budaya membaca di masyarakat?

Jawaban : untuk standar operasional prosedur pelaksanaan budaya membaca belum ada.

b. Apakah ada kelompok- kelompok belajar yang di bentuk untuk mendukung peraturan daerah tersebut?

Jawaban : kelompok- kelompok membaca sudah ada untuk mendukung pemerintah daerah. Walaupun masih belum memnuhi standar.

6. Faktor pendukung apa saja yang ada untuk mendukung budaya membaca?

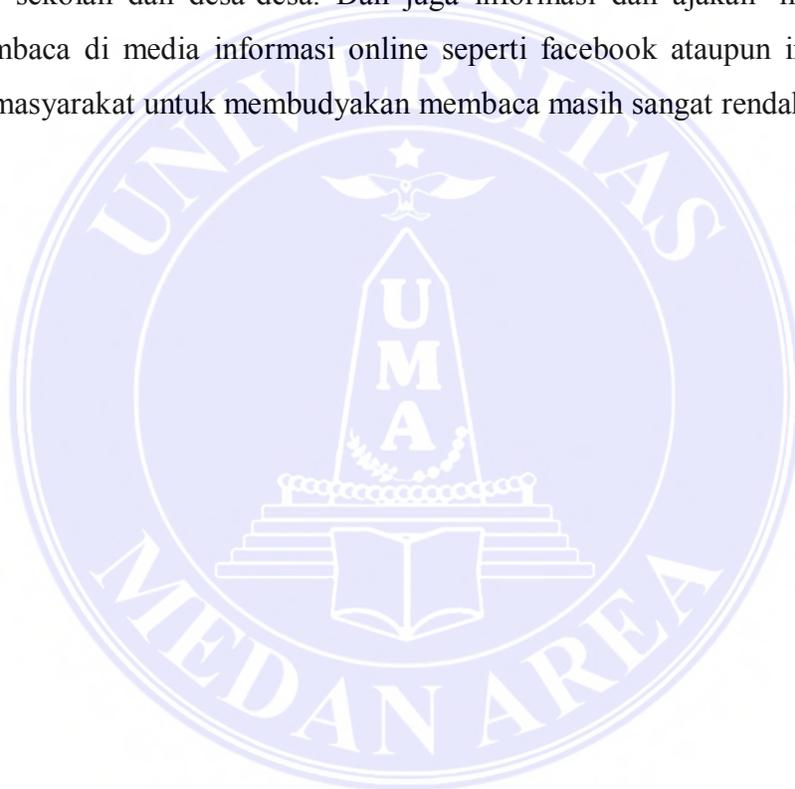
- Jawaban :
1. Sarana dan prasarana
 2. Peraturan yang tegas
 3. Motivasi
 4. Dukungan Orang tua

7. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam membudayakan membaca di lingkungan masyarakat?

- Jawaban :
1. Lingkungan
 2. kemajuan tekhnologi
 3. Perekonomian

8. Bagaimana Penyampaian Informasi mengenai Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Bab XVI Bagian Kedua Tentang Budaya Membaca Di Lingkungan Masyarakat?

Jawaban : penyampaian informasi dan sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan melakukan sosialisasi kepada camat dan kepala- kepala sekolah serta kepala desa, untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah No 7 tahun 2016. Melalui gerakan gemar membaca seperti yang disampaikan oleh bapak Bupati Serdang Bedagai. Begitupula dengan sosialisai melalui media cetak dan media online. Seperti spanduk untuk menumbuhkan minat baca masyarakat di lingkungan masyarakat yang ada di kecamatan, sekolah dan desa-desa. Dan juga informasi dan ajakan melakukan budaya gemar membaca di media informasi online seperti facebook ataupun instagram. Namun partisipasi masyarakat untuk membudayakan membaca masih sangat rendah.



Pasal 84

- (1) Pengembangan profesi guru berkelanjutan mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna bagi masyarakat dalam pencerdasan bangsa.
- (2) Guru yang mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan akan memperoleh angka kredit sesuai perhitungan yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- (3) Bagi guru yang tidak mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan atau tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan, akan dikenakan sanksi yang akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENDUKUNG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Budaya Membaca di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pasal 85

Setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal wajib untuk mengembangkan budaya membaca sebagai sebuah gerakan yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 86

- (1) Pengembangan budaya membaca di masing-masing satuan pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. membiasakan membaca 15 (lima belas) menit setiap hari sebelum hari pembelajaran dimulai;
 - b. menetapkan jadwal membaca khusus 1 (satu) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit;
 - c. menyediakan buku-buku bacaan yang menarik di setiap ruang kelas;
 - d. merevitalisasi perpustakaan menjadi tempat membaca yang disukai peserta didik;
 - e. menyediakan taman bacaan dan sarana prasarana membaca lainnya sebanyak dan senyaman mungkin;
 - f. melaksanakan kegiatan yang mendorong budaya baca, seperti lomba membaca cerita, diskusi buku dengan pengarang, dan lain sebagainya.
- (2) Pengembangan budaya membaca sangat ditentukan dari sikap dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Sikap dan keteladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan dengan:
 - a. kepala sekolah, guru, dan staf administrasi ikut membaca saat waktu membaca bersama;
 - b. setiap hari kepala sekolah, guru dan staf administrasi membawa buku bacaan dan membacanya di waktu istirahat;
 - c. kepala sekolah, guru dan staf administrasi mengunjungi perpustakaan untuk membaca.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib menjamin ketersediaan buku bacaan dengan menyediakan anggaran untuk pembelian buku.

- (5) Komite sekolah/madrasah berperan serta dalam mendukung terwujudnya pengembangan budaya membaca di masing-masing satuan pendidikan dengan menjalin kemitraan kepada pihak-pihak lain.

Bagian Kedua
Budaya Membaca di Lingkungan Masyarakat

Pasal 87

Masyarakat wajib berperan serta dalam mendukung terwujudnya pengembangan budaya membaca di lingkungan masing-masing dengan potensi dan kekhasan yang dimilikinya.

Pasal 88

- (1) Pengembangan budaya membaca di lingkungan masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
 - a. mendorong setiap orang tua untuk membacakan buku kepada anaknya di rumah;
 - b. mendorong setiap orang tua untuk membantu anak membaca dan menyediakan buku bacaan di rumah;
 - c. menyediakan taman bacaan yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga masyarakat;
 - d. mendorong terbentuknya kelompok-kelompok baca di masyarakat.
- (2) Untuk menjamin terwujudnya pengembangan budaya membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditetapkan kesepakatan bersama oleh seluruh warga masyarakat yang diatur dalam keputusan kepala dusun atau sebutan lainnya, dan/atau kepala desa/lurah untuk kemudian disosialisasikan dan dipatuhi bersama pelaksanaannya.
- (3) Perpustakaan daerah wajib membantu tersedianya buku-buku bacaan di setiap lingkungan masyarakat yang pengelolaannya diserahkan kepada kepala dusun atau sebutan lainnya dan/atau kepala desa/lurah.

Bagian Ketiga
Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Budaya Membaca

Pasal 89

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran yang mendukung terwujudnya pengembangan budaya membaca di setiap satuan pendidikan, lingkungan masyarakat dan perpustakaan daerah.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan gerakan budaya membaca di setiap satuan pendidikan dan lingkungan masyarakat perlu diterbitkan peraturan bupati.
- (3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat holistik dan komprehensif serta berkeadilan.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

- (3) Dunia usaha-industri diwajibkan memberikan bantuan untuk pendidikan melalui Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pasal 91

- (1) Satuan pendidikan kecuali satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah *dilarang* melakukan pungutan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
- (3) Pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar;
 - c. dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah; dan
 - d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar.
- (4) Pungutan tidak boleh:
 - a. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
 - b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau
 - c. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Pungutan yang ditetapkan setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan.
- (6) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menerima sumbangan.
- (7) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan yang ditetapkan melalui persetujuan bersama oleh dewan pendidik, komite sekolah/madrasah dan orang tua.
- (8) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Pasal 92

Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk lembaga independen yang berbentuk Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau bentuk lain yang menjalankan fungsi kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 93

- (1) Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel dan demokratis, dan merupakan mitra pemerintah daerah.
- (2) Dewan Pendidikan bersifat mandiri, akomodatif dan aspiratif terhadap prakarsa masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan Dewan Pendidikan dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dewan Pendidikan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. peran meliputi :
 1. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ;
 2. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 3. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
 4. mediator dalam Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat.
 - b. fungsi meliputi :
 1. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 2. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 3. menampung dan menganalisa aspirasi, ide tuntutan dari berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat ;
 4. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai :
 - a) kebijakan dan program pendidikan;
 - b) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - c) kriteria tenaga pendidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - d) kriteria fasilitas satuan pendidikan;
 - e) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 5. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 6. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Dewan Pendidikan wajib memberikan laporan kegiatan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 94

- (1) Anggota dewan pendidikan daerah berjumlah gasal dan paling banyak 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Anggota dewan pendidikan daerah minimal memiliki kualifikasi pendidikan S1

- (3) Anggota dewan pendidikan daerah terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (4) Panitia pemilihan anggota dewan pendidikan yang dibentuk oleh Bupati mengusulkan paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota dewan pendidikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang kemudian ditetapkan paling banyak 11 (sebelas) orang calon anggota dewan pendidikan.
- (5) Hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota dewan pendidikan diberikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota dewan pendidikan
- (6) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Anggota dewan pendidikan daerah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) Syarat dan ketentuan tentang calon anggota dewan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis bersifat mandiri, akomodatif, tanggap memperhatikan keluhan, saran dan kritik serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan.
- (2) Biaya operasional Komite Sekolah/Madrasah bersumber dari partisipasi masyarakat dan dana lain yang tidak mengikat.
- (3) Komite Sekolah mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. peran meliputi:
 1. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 2. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 3. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
 4. mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
 - b. fungsi meliputi :
 1. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 2. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/industri), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

3. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai :
 - a) kebijakan dan program pendidikan;
 - b) rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c) kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d) kriteria fasilitas pendidikan.
5. mendorong orang tua/wali murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
6. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
7. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Pasal 96

- (1) Peran serta masyarakat yang mendukung peningkatan pencapaian tujuan pendidikan di lingkungan masing-masing diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi peserta didik di lingkungan masyarakat.
- (2) Jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap rukun tetangga, rukun warga, dusun atau sebutan lainnya, dan/atau desa/kelurahan berdasarkan kesepakatan bersama warga masyarakat.
- (3) Kesepakatan bersama warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan kepala dusun atau sebutan lainnya, dan/atau kepala desa/lurah untuk kemudian disosialisasikan dan dipatuhi bersama pelaksanaannya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terwujudnya jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XVIII KERJA SAMA PENDIDIKAN

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk Perguruan Tinggi dan Satuan Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan memiliki wewenang untuk menjalin kerja sama bidang pendidikan dengan pihak ketiga di luar daerah.

BAB XIX SATUAN PENDIDIKAN ASING DAN LUAR DAERAH

Pasal 98

- (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional dan/atau diselenggarakan oleh badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di negara lain dapat dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan persetujuan/izin Bupati.



Wawancara dengan Kepala Desa Sentang Bapak Salimuddin pada tanggal 08 januari 2020



Wawancara dengan Kepala Desa Pematang Kuala Bapak Ramlan pada tanggal 08 Januari
2020



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)



Wawancara dengan Kepala Desa Bogak Besar Bapak Syahrur pada tanggal 08 januari 2020



Wawancara dengan Camat Teluk Mengkudu Bapak Romian Parulian Siagian, S.STP, MSi
pada tanggal 08 januari 2020





Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Bapak Drs. Joni Walker Damanik,MM pada tanggal 18 januari 2020



Wawancara dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai Bapak Khaidir, SE pada tanggal 18 januari 2020



Wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai Bapak dr. Rizki Ramadhan Hasibuan, MM pada tanggal 18 januari 2020



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 18 Mei 2020

Yang menyatakan,



Muhammad Arief Adillah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO 7
TAHUN 2016 BAB XVI BAGIAN KEDUA TENTANG BUDAYA
MEMBACA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM LITERASI DI KECAMATAN
TELUK MENGGUDU KABUPATEN SERDANG BERDAGAI

N a m a : Muhammad Arief Adillah

N I M : 181801025

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si

Pembimbing II



Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Abdul Kadir, SH, M. Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., M.S